DEDDY MIZWAR : FILM TIDAK HARUS ADA NILAI EDUKASI

ISSN 2962-956X

MAJALAH

# SENSOR FILM

Informasi Sensor dan Film

VOLUME 24 ● No. 01 ● 2026

Scan Qr Code



## MENAKAR MASA DEPAN FILM INDONESIA

Saptari Novia Stri
PENGUATAN ADVOKASI HUKUM PERFILMAN



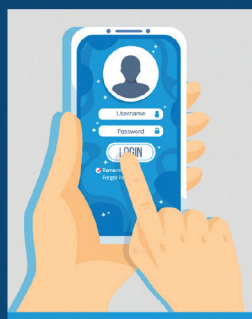
Nikita Willy
MAMA CULLA ADALAH MANIFESTASI KASIH SAYANG



ISSN 2962-956X

e-SiAS
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

# ALUR PENDAFTARAN SENSOR FILM DAN IKLAN FILM




## 1 BUKA APLIKASI

Pemohon melakukan Registrasi Akun melalui sistem e-SiAS pada tautan https://sensor.kemdikbud.go.id/

## 2 PEMBUATAN USER ID

- Pemohon diperlukan membuat User ID untuk melakukan registrasi akun pada sistem e-SiAS, dengan memasukkan data diri pemohon dan perusahaan secara benar
- Pemohon akan mendapatkan email notifikasi apabila registrasi telah disetujui
- Pemohon masuk ke dalam sistem e-SiAS sesuai dengan User ID yang sudah diaktifkan





## 3 ISI DATA LENGKAP

isi data lengkap serta dokumen-dokumen pendukung yang akan diunggah ke sistem e-SiAS.



## 4 PENDAFTARAN SENSOR FILM DAN IKLAN FILM

- Pemohon mengisi data Film dan Iklan Film yang akan disensor.
- Pemohon mengunggah berkas pengajuan data sensor film dan iklan film
- Pemohon mendapatkan Bukti Pendaftaran Penyensoran



## 5 PENYERAHAN MATERI

Untuk ukuran materi < 50 MB, pemohon dapat mengunggah secara daring pada sistem e-SiAS

Untuk ukuran materi > 50 MB, pemohon menyerahkan materi secara langsung ke Kantor LSF atau mengirimkan link G-drive melalui email. **

Pemohon akan memperoleh konfirmasi dari Sistem e-SiAS

## 6 PEMBAYARAN

- Pemohon melakukan pembayaran secara manual melalui loket kasir di kantor LSF atau melalui metode transfer bank dengan e-Billing**)
- Pemohon mendapatkan bukti pembayaran (invoice)







## 7 PENERBITAN STLS

- Pemohon mendapatkan STLS maksimal tiga (3) hari kerja sejak dilakukan pembayaran, apabila tidak ada revisi dan catatan.
- Apabila ada revisi dan catatan, STLS akan diterbitkan jika pemohon sudah menyerahkan kembali materi yang sudah diperbaiki sesuai dengan revisi dan catatan. (maksimal tiga (3) kali perbaikan revisi dan catatan)
- STLS elektronik dapat diunduh pada sistem e-SiAS.

*) KETERANGAN

1. *Saat pendaftaran, pemohon wajib melampirkan Surat Rekomendasi Perizinan Film dan Iklan Film dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek*
2. *Pemohon wajib melampirkan Sinopsis/Storyboard dari film/iklan (dalam bentuk pdf)*
3. *Materi film/iklan tersebut (jika file berukuran < 50 MB, bisa langsung diunggah secara daring melalui sistem e-SiAS)*

**) INFORMASI LAYANAN

*No. Telepon : (021) 2524845 Whatsapp : 0821 2211 1830*
*Faksimile : (021) 2529285*
*email : esias@kemdikbud.go.id | fasilitasi.lsf@gmail.com*

# DAFTAR ISI


**TAJUK**
Merayakan Hari Film Nasional (HFN) ..... 4

**SAHABAT SENSOR** ..... 5

**FOKUS**
Menakar Masa Depan Film Indonesia ..... 6

**PROFIL ANGGOTA**
Saptari Novia Stri
Penguatan Advokasi Hukum Perfilman ..... 10

**PROFIL TENAGA SENSOR**
- Nurrohman Efendi
  Menjaga Layar, Menjaga Nalar ... 16

**CATATAN ANGGOTA**
- Saat Algoritma Menjadi 'Kurator' Film Nasional ..... 20
- Pemandangan Umum Film Indonesia 2025 ..... 22
- Film sebagai Dokumentasi Sosial ..... 24
- Integrasi Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri Dengan Dunia Pendidikan ..... 26

**KRONIK**
- NIKITA WILLY
  Mama Culla adalah Manifestasi Kasih Sayang ..... 28





- ZEE ASADEL
  Tak Ingin Berperan di Film 21+..... 29
- ADI BING SLAMET
  Ingin Film Anak Bangkit Kembali..... 29

**SUDUT PANDANG**
- DEDDY MIZWAR
  "Film Tidak Harus Ada Nilai Edukasi" ..... 30

**KEGIATAN**
JAWAB TANTANGAN DENGAN PRESTASI
LSF Raih Penghargaan ZI WBK dan PPID..... 32

**APRESIASI**
- Menuju Kongres BPI IV 2026: Merajut Kedaulatan Sinema di Persimpangan Zaman..... 36
- Joko Anwar Ksatria Sinema dari Indonesia ..... 38
- Setengah Abad Penjaga Ingatan: Sinematek Indonesia ..... 40
- Edwin dan Keberanian Menjaga Bahasa Sinema ..... 42

**PANDUAN FILM**
- Suzzanna Santet Dosa Di Atas Dosa ..... 44
- Na Willa ..... 45
- Pelangi di Mars ..... 46

**DATA INFORMASI LSF**..... 47





**Foto Utama** : Usmar Ismail
**Fotografer** : Ed Zoelverdi
**Desain** : AgusWiro/AI
**Sumber** : *Usmar Ismail Mengupas Film* (Sinar Harapan, 1983); *Darah dan Doa* (Perfini, 1950)


MAJALAH SENSOR FILM
Informasi Sensor dan Film

**Penerbit**
Lembaga Sensor Film RI

**Dewan Pengarah**
Naswardi
Noorca M. Massardi

**Penanggung Jawab Umum**
Tri Widyastuti Setyaningsih
Ervan Ismail
Kuat Prihatin

**Pemimpin Redaksi**
Nusantara Husnul Khatim Mulkan

**Wakil Pemimpin Redaksi**
Hairus Salim
Widayat S. Noeswa
Erlan Basri

**Penanggung Jawab Sekretariat**
Titik Umi Kurniawati
Muhammad Nurhasim

**Redaktur Pelaksana**
Indri Ariefiandi

**Staf Redaksi**
Refilia Nur Arafiana
Dita Ramayani
Eka Kartika

**Kontributor :**
Amelia Putri, Dini Septiani, Rosalinda, M Anshori, Diva Reihan F Utomo, Reinanissa S Zatihulwani

**Fotografer**
Akbar Arief Darmawan

**Tim Artistik**
Agus Setiawan
Anton Setiawan

**Keuangan**
Fauzi Firmansyah

**Alamat:**
Jln. Jenderal Sudirman,
Gedung F Lt.6,
Komplek Kemdikbudristek,
Jakarta, 10270
Telp/Fax. (021) 2524845

sekretariat@lsf.go.id

Scan Qr Code

# Merayakan Hari Film Nasional (HFN)



**Dr. Naswardi.,MM., ME**
Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

HARI Film Nasional (HFN) adalah perayaan atas momentum sejarah sebagai tonggak permulaan atas pemajuan perfilman nasional. Menjadi wujud apresiasi atas prestasi dan pencapaian perfilman nasional saat ini dari momentum bersejarah: produksi film nasional pertama Indonesia karya Usmar Ismail berjudul *Darah dan Doa*.

Pada 1962, Djamaluddin Malik seorang tokoh dan produser film nasional Indonesia, memberikan saran dan rekomendasi agar HFN merujuk kepada tanggal produksi film *Darah dan Doa*, yaitu 30 Maret 1950. Dengan pertimbangan bahwa inilah film panjang pertama yang diproduksi oleh sutradara Indonesia Usmar Ismail.

Sejarah kemudian mencatat, Presiden Ketiga RI BJ Habibie menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hari Film Nasional, yang memutuskan 30 Maret sebagai Hari Film Nasional, dengan pertimbangan untuk pertama kalinya film cerita dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia. Sesuai dengan Keppres tersebut, penetapan HFN dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan diri, memotivasi insan film Indonesia, serta meningkatkan prestasi mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional, dan internasional.

Upaya mewujudkan peningkatan prestasi dan derajat perfilman nasional baru tercapai di 2024 dan 2025 berdasarkan jumlah produksi dan apresiasi penonton terhadap film nasional. Merujuk pada data Lembaga Sensor Film (LSF) 2024, telah diterbitkan 285 judul film nasional berbanding 283 judul film impor. Untuk pertama kali sepanjang sejarah, jumlah produksi film nasional melampaui jumlah produksi film impor.

Pada 2025, mementum keemasan perfilman nasional tetap terjaga dengan baik, dengan produksi sebanyak 270 judul diiringi dominasi 80,2 juta penonton yang memberikan apresiasi terhadap film nasional. Hal ini menjadi simbol dan tonggak sejarah bahwa cita-cita untuk meningkatkan prestasi dan derajat film Indonesia pada tingkat regional dan nasional telah diraih dan dicapai.

Peringatan HFN 2026 menjadi penting bagi LSF untuk terus berkontribusi dalam pemajuan perfilman nasional. Kontribusi tersebut terlihat melalui proses penelitian dan penilaian terhadap film secara baik, akurat, dan terpercaya, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan tontonan yang baik dan bermutu dapat dijaga.

Selain itu, LSF ingin menjadikan film nasional sebagai medium untuk memperkuat identitas nasional, dengan mencerminkan keberagaman budaya, nilai, dan cerita yang unik dari Indonesia. Menjadi alat diplomasi untuk menyampaikan pada dunia bahwa Indonesia negara yang kaya, indah, majemuk dalam nilai bhinneka tunggal ika. Sehingga sensor pada film tidak lagi dimaknai untuk membatasi, tapi untuk merawat nilai-nilai keindonesiaan kita. ❖

# Prihatin Tayangan Bertema LGBT

SAYA adalah ayah seorang gadis remaja yang dikagetkan dengan tontonan film yang mewajarkan hubungan sesama jenis. Saya jadi heran, kenapa film bertema LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transeksual) bisa tayang di Indonesia?

Bukankan negara kita tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Menurut saya, film-film bernuansa penyimpangan seperti ini janganlah diberi izin untuk tayang, karena mengganggu psikologis remaja yang sedang tumbuh dan mencari jati diri, selain dari sisi agama pun dosa.

Saya tidak bisa mengawasi anak saya 24 jam, apa yang dia tonton saat tidak berada di samping saya rasanya sulit untuk mengawasi. Jika ada remaja yang wajahnya seperti orang dewasa, apakah ketika pergi ke bioskop anak di bawah umur dimintai KTP untuk menonton? Jadi, saya minta tolong sekali untuk LSF supaya tidak meloloskan sensor film bertemakan LGBT.

***Ridwan Ali-Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat***




*Kami memahami keprihatinan Pak Ridwan. Lembaga Sensor Film (LSF) sangat berhati-hati dalam melakukan penyensoran, karena tema LGBT dianggap sensitif terkait norma kesusilaan dan agama di Indonesia.*

*Mengingat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.*

*Pasal 12 huruf b:*

*Film atau iklan film dikategorikan mengandung pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b apabila keseluruhan isi film dengan sengaja bertujuan untuk menampilkan adegan eksploitasi seksual dengan:*

*b. visual, dialog, dan/atau monolog yang menggambarkan aktivitas persenggamaan secara vulgar dan perilaku seks yang menyimpang atau tidak wajar.*

# Peran LSF di Festival Film

MENJELANG akhir tahun, berbagai festival film kembali digelar di banyak kota. Namun, di tengah semangat itu, muncul juga perbincangan di media sosial yang mempertanyakan peran sensor film, utamanya ketika ada film yang tidak lolos sensor.

Sebagian masyarakat menilai proses sensor menghambat kebebasan berekspresi, sementara di sisi lain, LSF memiliki tanggung jawab untuk melindungi penonton sesuai klasifikasi usia dan nilai-nilai sosial. Perbedaan cara pandang inilah yang kerap menimbulkan salah paham.

Agar tidak selalu dipersepsikan sebagai pembatas, mungkin LSF bisa lebih aktif menjelaskan fungsi sensor. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami bahwa sensor bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam berkarya.

**Puspita -Yogyakarta**




ILUSTRASI: AGUSWIRO/AI

# Menakar Masa Depan Film Indonesia

Lebih dari tujuh dekade lalu, untuk pertama kalinya *Darah dan Doa* diproduksi, yang kemudian dianggap sebagai tonggak sejarah lahirnya perfilman di Tanah Air. Apakah film nasional kini telah berdaya dan berjaya?

**Nusantara HK Mulkan, Amelia Putri, Dini Septiani, Rosalinda, M Anshori, dan Diva Reihan F Utomo**

KECEMBURUAN mewarnai kalangan militer dari divisi lain dan masyarakat tertentu karena menilai film *Darah dan Doa* terlalu menonjolkan peran divisi Siliwangi. Tak ayal, seperti diungkapkan dalam *Profil Dunia Film Indonesia* yang ditulis Salim Said (1982), film besutan Usmar Ismail yang dirilis pada September 1950 itu sempat mengalami pencekalan di beberapa daerah di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat sejumlah adegan dipangkas, sebelum Presiden Soekarno memberi izin perilisan ulang film yang memulai syuting sejak 30 Maret 1950 itu. Setelah melalui proses panjang, pemerintah menetapkan 30 Maret sebagai Hari Film Nasional (HFN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1999 yang ditan-

> Negara harus hadir untuk memperkuat ekosistem, tapi jangan sampai terlalu mengatur kreativitas--
> **Celerina Judisari Plt Ketua *Umum Badan Perfilman Indonesia***

datangani oleh Presiden Ketiga BJ Habibie. "Karena pada hari itu, 49 tahun yang lalu, untuk pertama kali seorang anak bangsa secara mandiri memproduksi sebuah film," papar Habibie dalam sambutan di peringatan HFN di Istana Negara, Jakarta, saat itu.

Lebih dari 75 tahun berlalu, bagaimana kondisi perfilman nasional saat ini? "Industri film kita bagus, harus kita jaga. Juga bagaimana terus menghidupkan agar masyarakat tetap ke bioskop," papar Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam pernyataan tertulis beberapa waktu yang lalu.

Namun, jumlah bioskop yang hingga 2025 sekitar 2.500 layar dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 287 juta jiwa. Dengan rasio layar per 100 ribu penduduk, maka baru mencapai 0,7 per layar, sehingga idealnya ada 10 ribu layar bioskop. Untuk itu, Kemenbud menghadirkan Layar Digi, sebuah konsep *microcinema* yang memanfaatkan ruang komersial strategis, seperti gerai minimarket hingga tingkat kecamatan di daerah-daerah yang belum memiliki bioskop.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Celerina Judisari saat ditemui *Sensor Film* menyetujui penguatan bioskop. Selain juga pengaturan distribusi antara jaringan televisi *over the top* (OTT) dengan layar lebar, di mana film biasanya diputar lebih dulu di bioskop, empat bulan berikutnya baru di OTT. "Negara harus hadir untuk memperkuat ekosistem, tapi jangan sampai terlalu mengatur kreativitas. Jadi berjalannya beriringan sebagai mitra strategis," tegasnya.

Optimisme pun hadir mengacu pada begitu cepat pulihnya industri film usai pandemi Covid-19, bahkan mampu melampaui saat sebelum wabah itu terjadi. Dari puncak keterpurukan pada 2021 dengan jumlah pembeli tiket bioskop 4,5 juta penonton, pada 2023 melonjak 114,5 juta penonton, diikuti 2024 dan 2025 dengan jumlah di atas 80 juta penonton.

"Semoga tidak salah, Indonesia satu-satunya negara yang pasca-pandemi tidak hanya pulih, tapi bahkan lebih baik dari sebelum pandemi. Negara lain, mentok-mentok ya balik seperti sebelumnya dan masih banyak sekali negara yang sangat kesulitan berproses untuk bisa pulih seperti masa sebelum pandemi," ungkap Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) Edwin Nazir.

Sementara dari sisi regulasi, dia menilai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sudah sangat ketinggalan zaman. "Contohnya yang sangat berhubungan dengan LSF adalah industri digital *streaming*,



**KONSEP *MICROCINEMA*. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengunjungi fasilitas Layar Digi di kawasan Gading Serpong, Tangerang.**

FOTO: KEMENBUD



**NINIEK L KARIM.** Penting untuk direnungkan di Hari Film Nasional 2026.

FOTO: LSF



**EDWIN NAZIR.** Indonesia mampu bangkit setelah pandemi.

FOTO: LSF

OTT di 2009 kan belum ada. Zaman itu masih DVD dan bentuk lainnya. Apakah itu diperlakukan sebagai film atau misalnya sebagai penyiaran *gitu*," beber Edwin.

**Agenda Mendesak**

Di tengah disrupsi yang terjadi, Ketua Umum Asosiasi Video *Streaming* Indonesia (AVISI) Hermawan Sutanto memandang antara sensor film dengan platform digital bukanlah dua kutub yang bertolak belakang.

Dia memproyeksikan pendapatan industri video di Indonesia akan tumbuh dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$3,7 miliar di 2028, merujuk pada riset Media Partner Asia. Peluang ini didorong oleh basis populasi muda (gen Y dan gen Z) yang mencapai 52 persen dari total penduduk.

Salah satu prioritas Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) di 2026, seperti diungkapkan Ketua LSF Naswardi adalah mendorong revisi UU Perfilman demi menjawab berbagai isu baru, utamanya terkait pengawasan tayangan dan klasifikasi usia di OTT. "Rencana dan gagasan itu butuh aturan dari Kemenbud untuk implementasinya," jelas Naswardi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun memandang revisi atas UU Perfilman sangat mendesak dilakukan. Mengingat seperti diungkapkan Plt Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana dalam wawancara secara daring, platform *streaming* bersifat lintas negara, berbasis algoritma, dan tersedia secara *on-demand*, sehingga melahirkan model bisnis baru dalam industri media dan hiburan.

"Apabila terdapat platform yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Komdigi memiliki kewenangan untuk menegakkan kepatuhan tersebut melalui berbagai langkah administratif. Kolaborasi yang kuat antara LSF dan Komdigi menjadi penting, agar pengawasan terhadap distribusi film digital dapat berjalan efektif tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan," papar Sonny.

Dunia yang semakin dikuasai digital inilah yang juga menjadi perhatian serius aktris senior Niniek L Karim yang menurutnya penting untuk direnungkan di Hari Film Nasional 2026. "Indonesia ada 280 juta penduduk, anak-anaknya sekitar 75 juta. Orangtuanya siap enggak? Jangan sampai mereka lari pada yang buruk. Digital itu punya *the other side of bad things, the other side of midnight*. Bahaya sekali kalau tidak disadari," papar akademisi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini.

Melihat semua itu, pekerjaan memajukan ekosistem perfilman tentu saja belum selesai. Kehadiran negara pun harus lebih dari sekadar membangun layar baru atau merayakan film yang sukses tapi juga perlu menyentuh akar rumput, komunitas dan kolektif, dengan pendanaan produksi yang lebih memadai. Selain juga memberikan kebebasan kepada para sineas untuk bersuara. ❖ **(Nuz)**

## *Chand Parwez Servia* -Produser Senior

# "Banyak yang Melihat Film Hanya Barang Dagangan"

DARI 270 judul film layar lebar nasional yang mendapat Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) pada 2025, sebanyak 11 judul di antaranya merupakan produksi Starvision. Sehingga membuatnya menjadi rumah produksi dengan jumlah film nasional terbanyak kedua dalam layanan penyensoran di tahun tersebut.

Lalu apa harapan pendiri Kharisma Starvision Plus, Chand Parwez Servia setelah selama 30 tahun berkarya dengan 187 film. Kepada Rosalinda dan Nusantara Mulkan, dia mengungkap sejumlah hal terkait pandangannya atas ekosistem perfilman Indonesia. Berikut petikannya:

**Apa makna strategis Hari Film Nasional?**

Hari Film Nasional itu mengajak kita kembali mengenang sejarah, bahwa kita mampu mereposisi industri yang begitu besar dengan insan-insan perfilman lokal dan kita jadikan sebagai pengingat untuk kita terus berkarya serta bertumbuh lebih baik setiap tahun.

**Apakah regulasi saat ini sudah cukup adaptif dalam melindungi kepentingan produser nasional di tengah model bisnis berbasis data?**

Yang paling membuat ekonomi mahal itu apa? Rantai tata niaga. Semakin banyak orang ikut campur, semakin banyak ongkos administrasi yang harus dibayar, sehingga konsumen membayar lebih mahal.

Jadi perlu enggak regulasi? Nah itu yang harus dijaga. Kalau tidak efektif, jangan. Kalau hanya menambah rantai tata niaga, jangan.




FOTO: LSF

**Apa prediksi Anda atas perkembangan film Indonesia selama 5 hingga 10 tahun ke depan?**

Sekarang kita ada titik yang paling penting: perlu lebih banyak orang yang punya visi. Banyak orang di industri tidak mengerti, tidak punya visi, melihat film hanya sebagai barang dagangan.

Seperti alam: ada kepentingan menjaga alam, ada kepentingan bisnis. Saya akan berjuang. Mudah-mudahan, selama masih diberi umur panjang, saya akan mempertahankan hal baik tersebut.

**Bagaimana Anda menilai posisi LSF?**

Nanti kalian bisa melihat film itu dengan transparan dan menilai, ini produsernya lagi *nyari* duit atau ini produsernya lagi mau membuat budaya. Budaya menonton yang baik saya harapkan itu yang menyelamatkan nanti. Tapi apakah LSF mau ke arah itu? Kalau mau, saya dengan senang hati membantu. ❖ **(Nuz)**

# PERJALANAN HARI FILM NASIONAL

## Masa Awal (1926–1940-an)



- **1926:** Film cerita pertama di Indonesia *Loetoeng Kasaroeng* dirilis. Meskipun diproduksi di Bandung, film ini disutradarai oleh orang Belanda G Kruger dan L Heuveldorp.

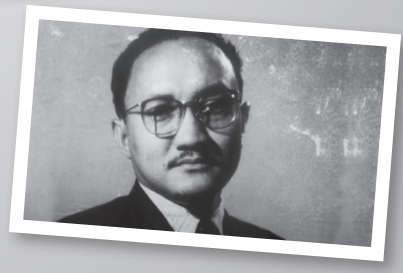


- **1928:** Film *Lily Van Shanghai* dirilis, namun masih didominasi oleh pengaruh sutradara asing (Tiongkok).

## Titik Balik Kedaulatan (1950)



- 30 Maret 1950: Hari pertama pengambilan gambar (*first slate*) film *Darah dan Doa* (*The Long March of Siliwangi*).



- Film ini menjadi tonggak sejarah karena menjadi film pertama yang diproduksi anak bangsa setelah Indonesia berdaulat sebagai sebuah negara.
- Disutradarai oleh orang Indonesia asli, Usmar Ismail.
- Diproduksi oleh perusahaan film milik anak bangsa Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini). Ceritanya mencerminkan ideologi dan perjuangan bangsa Indonesia.



## USAHA PENETAPAN (1962–1964)

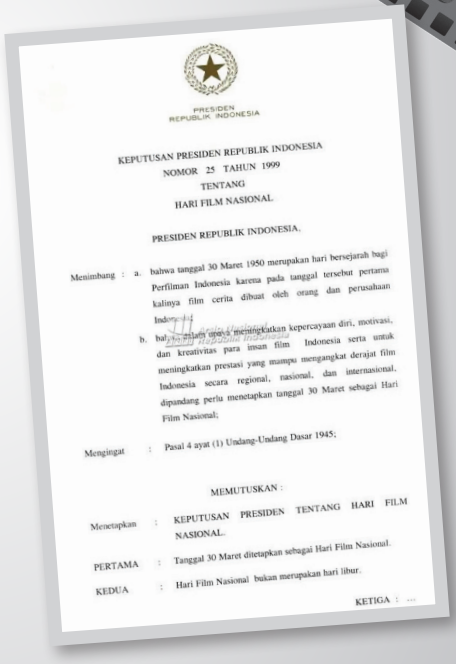
**1962:** Dalam konferensi kerja Dewan Film Nasional dengan Organisasi Perfilman, tanggal 30 Maret mulai diusulkan sebagai Hari Film Nasional.

**1964:** Upaya peresmian terus berlanjut, namun sempat terhambat oleh dinamika politik dan kondisi industri film pada masa itu.

## PERESMIAN HARI FILM NASIONAL (1999)

**1999:** Setelah melalui proses panjang, pemerintah secara resmi menetapkan 30 Maret sebagai Hari Film Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie.

Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, memotivasi para insan film Indonesia, dan meningkatkan kualitas film nasional secara keseluruhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
HARI FILM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tanggal 30 Maret 1950 merupakan hari bersejarah bagi Perfilman Indonesia karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film cerita dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan kreativitas para insan film Indonesia serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional, dan internasional, dipandang perlu menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

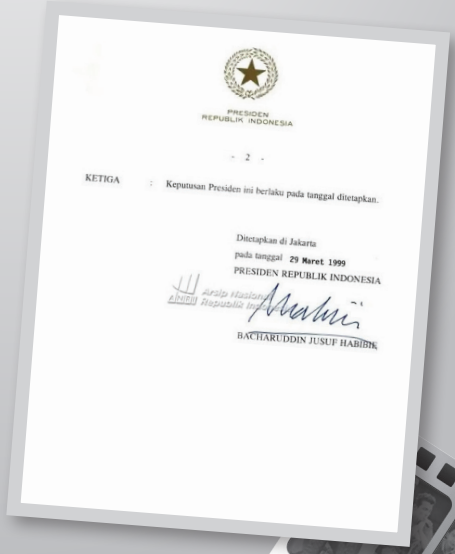
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI FILM NASIONAL.

PERTAMA : Tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.

KEDUA : Hari Film Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

*Saptari Novia Stri*

# Penguatan Advokasi Hukum Perfilman

**Saptari Novia Stri memimpin penguatan advokasi hukum perfilman melalui revisi regulasi, literasi hukum, dan perlindungan publik di era distribusi digital.**

**Indri Ariefiandi**

PERKEMBANGAN teknologi digital telah mengubah wajah industri film secara drastis. Distribusi film kini tidak lagi terbatas pada layar bioskop atau televisi, tetapi juga melalui berbagai platform digital yang memungkinkan konten bergerak lintas negara tanpa batas ruang dan waktu. Dalam situasi ini, kebutuhan akan kerangka hukum yang adaptif menjadi semakin penting. Di sinilah peran Saptari Novia Stri, Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi Komisi II Lembaga Sensor Film (LSF) RI, menjadi strategis dalam memperkuat fondasi hukum perfilman Indonesia.

Saptari Novia Stri yang lebih akrab dipanggil Tita merupakan anggota LSF periode 2024–2028 yang memimpin Subkomisi Hukum dan Advokasi di lingkungan Komisi II. Ia lahir di Jakarta pada 7 November 1968 dan memiliki latar belakang pendidikan hukum perdata dari Universitas Islam Jakarta. Sebelum bergabung di LSF, ia memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan kebudayaan dan hukum, termasuk pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan serta sejumlah posisi strategis lain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengalaman tersebut membentuk perspektifnya dalam memandang regulasi perfilman sebagai bagian penting dari tata kelola kebudayaan nasional.

Sebagai Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi, Tita bertanggung jawab melakukan identifikasi, kajian, serta analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LSF. Subkomisi ini juga berperan menyiapkan naskah akademik, konsep regulasi, serta strategi advokasi terkait pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang perfilman, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang dinilai sudah tidak



FOTO : DOKPRI



FOTO : DOKPRI

**KELILING INDONESIA.** Mengawal literasi serta edukasi hukum bidang penyensoran dan perfilman.

sepenuhnya mampu menjawab tantangan era digital.

Revisi Undang-Undang (RUU) Perfilman menjadi agenda penting yang dikawal oleh Subkomisi Hukum dan Advokasi. Perubahan regulasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum perfilman mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, melindungi hak cipta, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri film. Di sisi lain, regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial, sekaligus melindungi nilai budaya bangsa.

Dalam menjalankan tugasnya, Subkomisi Hukum dan Advokasi tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga menjalankan program literasi dan edukasi hukum perfilman. Kegiatan ini menyasar mahasiswa, pelajar sekolah menengah kejuruan, komunitas film, serta para pembuat film di berbagai daerah. Melalui program ini, para peserta diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam berkarya, mekanisme penyensoran film, serta pentingnya klasifikasi usia penonton.

Program literasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Gerakan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Dengan demikian, fungsi sensor tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya perlindungan publik.

> "Regulasi film harus melindungi publik tanpa mematikan kreativitas."-
>
> **Saptari Novia Stri**

Dalam praktik pengawasan film, Subkomisi Hukum dan Advokasi bekerja sama dengan Subkomisi Pemantauan untuk memastikan bahwa film yang beredar di bioskop, televisi, maupun platform digital telah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). STLS merupakan dokumen legal yang

menyatakan bahwa film telah melalui proses penelitian dan penilaian oleh LSF, termasuk penentuan kelayakan tayang dan klasifikasi usia penonton.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah maraknya distribusi film melalui platform digital atau layanan *over-the-top* (OTT) yang tidak selalu mengikuti prosedur penyensoran. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Subkomisi Hukum dan Advokasi lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan membangun dialog bersama pelaku industri dan pengelola platform digital.

Dalam memimpin subkomisi, Tita mengedepankan gaya kepemimpinan yang bersifat kolaboratif dan kekeluargaan. Ia bekerja bersama tenaga sensor, tim sekretariat, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap program kerja dapat dilaksanakan secara efektif. Pendekatan ini memungkinkan koordinasi yang lebih solid dalam merespons berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik perfilman.

Melalui kerja advokasi regulasi, literasi hukum, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak, Saptari Novia Stri berupaya memastikan bahwa sistem hukum perfilman Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagi dirinya, film bukan sekadar produk hiburan, melainkan medium budaya yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan karakter masyarakat.

Karena itu, penguatan regulasi perfilman menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berkarya dan perlindungan publik, sekaligus memastikan bahwa film Indonesia dapat berkembang secara sehat, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai budaya bangsa. ❖ **(ind)**

## BIODATA

**SAPTARI NOVIA STRI**
**Tempat/Tgl/ Lahi**r: Jakata, 7 November 1968

**PENDIDIKAN**
S-1 - JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
Universitas Islam Jakarta

**KURSUS**
Short course "***Human Rights Training in*** Australia, 2004

**RIWAYAT PEKERJAAN**
- 2024 s.d. 2028, Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi, Komisi II bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi, Lembaga Sensor Film.
- 2020 s.d. 2024, Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi, Komisi II bidang Pemantauan, Apresiasi dan Promosi, Kerjasama Antar Lembaga, dan Hukum dan Advokasi, Lembaga Sensor Film.
- 2019 s.d. 2024, Kasubdit Penulisan Sejarah, pada Direktorat Sejarah, dan Kasubdit Penulisan Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2015 s.d 2019, Kepala Subdit Pembinaan Tenaga Kesejarahan pada Direktorat Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2013 s.d. 2015, Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**KUALIFIKASI**
- Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kebudayaan, Tahun 2025.
- Tim Penyusun Jawaban Gugatan Pengadilan Negeri Pariaman terhadap Kasus Film "NIA".
- Tim Penyusun Peraturan Ketua Lembaga Sensor tentang Pedoman dan Mekanisme Penyensoran, Tahun 2025.
- Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, Tahun 2022
- Tim Penyusun Naskah Kajian Tarif Sensor Dalam Perspektif Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun 2020.
- Tim Penyusun Revisi Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya, Tahun 2009-2011.

D17

**LEMBAGA SENSOR FILM**
REPUBLIK INDONESIA

menyatakan bahwa film ini telah lulus sensor

TELOP BARU
LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUN 2026

**UNTUK 17 TAHUN KE ATAS**

Ketua,

Dr. Naswardi, M.M., M.E.











*Nurrohman Efendi*

# Menjaga Layar, Menjaga Nalar

Di ruang gelap yang sunyi, saat lampu mati dan gambar muncul di layar, tak ada tepuk tangan riuh. Poster megah atau karpet merah tak menyambut. Yang ada hanya fokus penuh, catatan singkat, dan diskusi panjang setelah film diputar. Di tempat seperti inilah seorang Tenaga Sensor bekerja—menganalisis gambar, menilai dialog, dan memperkirakan dampak sebuah film.

Indi Ariefiandi/Nurrohman Efendi

NURROHMAN Efendi menjabat sebagai Tenaga Sensor periode 2024–2028 di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI). Lahir di Klaten pada 2 September 1980, ia datang ke posisi ini dengan pengalaman panjang di dunia media visual. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret ini telah lebih dari satu dekade bergelut dalam produksi konten televisi dan jurnalistik visual.

Penugasan periode 2024–2028 merupakan masa bakti keduanya. Kepercayaan berulang ini mencerminkan rekam jejak profesional dan integritas yang konsisten. Ia menegaskan tugasnya bukan sekadar "memotong adegan", melainkan menjaga etika di dunia visual. Setiap gambar dibaca, setiap dialog ditimbang, dan setiap potensi dampak pada penonton dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kariernya dimulai sebagai jurnalis foto di LKBN *Antara* pada awal 2000-an. Ia kemudian menjadi kamerawan di *Trans TV* dan terlibat dalam berbagai program faktual seperti *Reportase, Jika Aku Menjadi, Mozaik Islam, Jelajah,* dan *Indonesia Punya Cerita*. Ia juga pernah dipercaya sebagai *Junior Producer* sebelum menekuni kewirausahaan kreatif. Pengalaman ini membentuk ke-



FOTO : DOK PRI



FOTO : DOK PRI

**HUMANIS .** **Bukan sekadar seremoni, tetapi kerja nyata untuk kualitas tontonan.**

mampuannya membaca bahasa visual secara detail.

Sebagai bagian dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, ia bekerja di titik keseimbangan: menjaga kebebasan berekspresi kreator sekaligus melindungi masyarakat. Fokus utama lembaga bukan menilai mutu artistik film, melainkan kesesuaian tontonan dengan kelompok usia melalui klasifikasi SU, 13+, 17+, dan 21+. Label tersebut berbasis kajian psikologis tentang perbedaan kematangan kognitif dan emosional penonton.

Landasan kerjanya jelas, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menugaskan negara melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan perfilman nasional. Namun lanskap tontonan kini berubah cepat. OTT, media sosial, dan kanal digital membuat arus konten nyaris tak terbendung.

Bagi Nurrohman, kondisi ini justru menegaskan relevansi Tenaga Sensor. Algoritma mungkin menyaring preferensi, tetapi tidak memiliki pertimbangan etis manusia. Dalam periode 2024–2028, sebanyak 34



FOTO : DOK PRI

**PROFESIONAL BERWIBAWA - Di balik layar, ada dedikasi yang tak terlihat.**

Tenaga Sensor bekerja dengan tekanan volume konten yang terus meningkat. Setiap film tetap harus ditonton utuh dan dinilai secara kolektif melalui musyawarah, dengan mekanisme banding sebagai bagian akuntabilitas.

LSF juga mendorong Budaya Sensor Mandiri agar masyarakat menjadi subjek aktif melalui literasi media. Ke depan, tantangan makin kompleks dengan hadirnya AI dan *deepfake* yang mempersulit deteksi manipulasi visual.

Sejak 2024, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia juga aktif terlibat dalam JAFF Market sebagai bagian dari ekosistem industri film yang terus berkembang. Kehadiran LSF dalam forum tersebut menegaskan komitmen lembaga untuk memperkuat dialog antara regulator, pelaku industri, dan pasar internasional. Nurrohman Efendi termasuk person yang terlibat langsung dalam rangkaian kegiatan JAFF Market, memperluas peran Tenaga Sensor tidak hanya pada aspek penilaian, tetapi juga advokasi literasi dan pemahaman klasifikasi usia di ruang industri.

Pada akhirnya, bagi Nurrohman, tugas Tenaga Sensor adalah seni menjaga keseimbangan. Ia tidak melihat dirinya sebagai pembatas kreativitas, melainkan penyeimbang agar setiap karya bertemu audiens yang tepat. Karena menjaga layar, pada akhirnya, adalah menjaga nalar generasi. ❖

## DATA PRIBADI

- Nama: Nurrohman Efendi
- Tempat, Tanggal Lahir: Klaten, 2 September 1980
- Jenis Kelamin: Laki-laki

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

- 1999 – 2004: Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret - Surakarta
- 1996 – 1999: SMUN 1 Klaten
- 1993 – 1996: SMPN 1 Klaten
- 1987 – 1993: SDN Bareng Lor 2 Klaten

**PENGALAMAN KERJA**

- Januari 2016 – Agustus 2016: Junior Producer – TRANS TV

**Program:** Mozaik Islam, Music Room

- 2007 – 2015: Kamerawan (Camera Person) – TRANS TV

**Program:** Reportase, Main Yuk, John Pantau, Tangan Di Atas, Kado Istimewa, Dengan Hati, Jelajah, Harmoni Alam, Jika Aku Menjadi, Indigo, Moccachino, Mozaik Islam, Harta Tahta Wanita, Indonesia Punya

**Cerita, Ikon Kuliner Nusantara**

- 2003 – 2004: Jurnalis Foto – LKBN ANTARA




***RED CARPET*** **:Cerminan komitmen penuh dalam menjaga standar sensor dan perlindungan penonton Indonesia.**

FOTO : DOK PRI

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

menyatakan bahwa film ini telah lulus sensor

TELOP BARU
LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUN 2026

R13

UNTUK 13 TAHUN KE ATAS

Ketua,

Dr. Naswardi, M.M., M.E.





# SAAT ALGORITMA MENJADI 'KURATOR' FILM NASIONAL



ILUSTRASI: AGUSWIRO/AI

**Perjuangan film nasional kini tidak hanya berkutat pada produksi dan distribusi fisik, tapi juga pada visibilitas digital. Adalah algoritma yang menentukan pola konsumsi, preferensi, dan interaksi masyarakat.**

SETIAP 30 Maret, Indonesia memperingati Hari Film Nasional—menandai dimulainya pengambilan gambar *Darah dan Doa* karya Usmar Ismail pada 1950. Momentum itu sejak lama dimaknai sebagai tonggak kesadaran bahwa film bukan sekadar hiburan, melainkan pernyataan kebudayaan dan kebangsaan.



Nusantara Husnul Khatim Mulkan
**Ketua Subkomisi Publikasi LSF RI**

Namun, lebih dari tujuh dekade kemudian, lanskap yang dihadapi film nasional berubah drastis karena layar lebar bukan lagi satu-satunya panggung. Platform global berbasis langganan dan *video-on-demand* menghadirkan kemudahan akses tanpa batas ruang dan waktu.

Penonton Indonesia dapat menikmati film dari berbagai negara hanya lewat gawai. Kini, algoritma seolah menjadi 'kurator' baru yang menentukan apa yang terlihat, ditonton, dan dibicarakan.

Walaupun di platform *streaming* sendiri, belum tentu penonton lebih tertarik kepada film luar negeri ketimbang film produksi anak bangsa. FlixPatrol mendata film horor zombi Indonesia *Abadi Nan Jaya* (2025) garapan Kimo Stamboel sukses besar di Netflix,

> Apakah nasionalisme dalam perfilman masih relevan ketika penonton lebih loyal pada genre dan tren global ketimbang identitas kebangsaan?

dengan ditonton lebih dari 11 juta kali dalam kurun waktu kurang dari sepekan setelah tayang pada 23 Oktober 2025.

Tak hanya itu, film ini pun memuncaki peringkat pertama film non-bahasa Inggris global dan masuk Top 10 di 75 negara. Meskipun algoritma Netflix berperan penting dalam distribusinya, kesuksesan film ini merupakan kombinasi antara strategi platform global, konten yang unik, dan kualitas teknis, bukan sekadar algoritma belaka.

Lalu bagaimana dengan film layar lebar? Mengutip data dari *filmindonesia.or.id,* jumlah penonton film Indonesia sepanjang 2025 menembus rekor baru dengan capaian lebih dari 80,2 juta orang per 31 Desember 2025, sedikit melampaui angka pada 2024 sebanyak 80,21 juta orang. Penguasaan film nasional sendiri menguasai setidaknya 66 persen pasar bioskop.

Film-film seperti *Jumbo* dan *Agak Laen: Menyala Pantiku!* memimpin *box office* dengan raihan di atas 10 juta penonton. Selain horor, genre drama dan komedi yang kerap mengangkat dari hal-hal viral di media sosial juga sangat diminati.

Tak sedikit pula yang mengikuti tren *remake* maupun adaptasi film populer dari luar negeri untuk menyesuaikan dengan selera lokal. Sebut saja *Sore* yang mengangkat premis *time-loop* (pelintasan waktu) untuk memperjuangkan cinta seperti pernah diangkat oleh sejumlah film, seperti drama Korea *Lovely Runner*.

Yang juga menarik, tren di Wattpad, platform yang menghubungkan penulis dan pembaca dari seluruh dunia untuk berbagi cerita, puisi, dan artikel dalam berbagai genre pun kini rutin masuk radar produksi. Selain juga kisah *true crime* di YouTube hingga narasi viral TikTok yang menjadi pola kerja baru dalam industri film.

Di sinilah kita perlu memaknai ulang konsep "film nasional", apakah ditentukan oleh kewarganegaraan pembuatnya, bahasa yang digunakan, atau nilai yang diusung? Film nasional tidak hanya bersaing dengan sesama produksi dalam negeri, tetapi juga dengan katalog global yang dipromosikan melalui sistem rekomendasi berbasis data.

**Memaknai Batas Algoritma**

Tanggung jawab kebudayaan tentu tidak hanya berhenti pada negara, industri film nasional juga perlu membaca logika algoritma. Algoritma bekerja berdasarkan pola konsumsi, preferensi, dan interaksi pengguna yang bersifat netral secara teknis, namun tidak selalu secara kultural.

Film dengan dukungan promosi besar dan jejak tontonan global cenderung lebih sering muncul di beranda. Sementara film nasional, utamanya yang tidak didukung kampanye masif, berisiko tenggelam dalam lautan konten.

Hari Film Nasional 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi bahwa perjuangan film Indonesia kini berada pada level yang lebih subtil—di balik baris kode dan sistem rekomendasi. Nasionalisme tidak lagi diwujudkan hanya melalui produksi film bertema perjuangan, tetapi melalui keberpihakan kebijakan, kecerdasan strategi industri, dan kedewasaan penonton dalam memilih tontonan.

Film nasional tidak perlu takut pada platform global. Sebab, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk beradaptasi, konsistensi menjaga identitas, dan komitmen bersama agar cerita-cerita Indonesia tetap menemukan jalannya—baik di layar lebar maupun di layar genggam.

Karena di era algoritma, nasionalisme bukan soal menolak dunia, melainkan memastikan Indonesia tetap hadir dan terlihat di dalamnya. Nasionalisme film bukan berarti menutup diri dari arus dunia, melainkan memastikan bahwa karya anak bangsa memiliki ruang yang adil dalam ekosistem digital. ❖ **(Nuz)**

# Pemandangan Umum Film Indonesia 2025

Produksi film nasional terus meningkat, tapi keterbatasan layar membuat sebagian tak tertayangkan. Diperlukan suatu terobosan kebijakan untuk menampung gairah ini.



FOTO : DOKPRI

**FILM NASIONAL.** Suasana proses pengambilan gambar pada produksi film nasional.

SEPANJANG tahun 2025, jumlah produksi perfilman nasional mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir. Data dari Sistem Administrasi Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS) Lembaga Sensor Film Republik Indonesia mencatat film layar lebar nasional yang memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebanyak 270 judul. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 261 judul, dan untuk pertama kalinya pula jumlah film nasional melampaui film impor yang tercatat 255 judul.

Dari sisi genre, produksi 2025 masih didominasi drama, disusul horor, komedi, dan aksi. Namun dalam distribusi dan rilis, genre horor tetap menjadi yang terbesar tayang di bioskop sebagaimana beberapa tahun terakhir. Pola ini mencerminkan rasionalitas pasar: genre dengan basis penonton kuat dan risiko finansial yang lebih terukur menjadi pilihan utama rumah produksi. Di sisi lain, konsentrasi pada genre tertentu juga mengindikasikan homogenitas preferensi pasar serta terbatasnya diversifikasi tema dan pendekatan naratif.



Tri Widyastuti Setyaningsih,
**Ketua Komisi I Bidang Penyensoran, LSF RI**

Sesuai klasifikasi usia, mayoritas film nasional 2025



FOTO : DOKPRI

**PROSES SYUTING.** Awak film sedang menjalani proses syuting *Habibie dan Ainun*.

berada pada golongan 13+ (remaja), diikuti kategori 17+ (dewasa). Sementara kategori SU (semua umur) dan 21+ memiliki proporsi lebih kecil. Hal ini konsisten dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan orientasi industri pada segmen remaja hingga dewasa muda sebagai basis pasar utama bioskop nasional. Strategi tersebut menempatkan potensi jangkauan audiens dan peluang *box office* sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan konten.

Namun demikian, jumlah film yang memperoleh STLS tidak identik dengan jumlah film yang tayang pada tahun yang sama. Dengan asumsi rata-rata tiga hingga empat judul rilis setiap minggu, kapasitas edar tahunan berkisar 150 judul. Data Direktorat Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan mencatat pada 2025 terdapat 174 judul film layar lebar nasional yang berhasil ditayangkan. Artinya, puluhan judul lainnya mengalami penundaan atau tidak memperoleh slot edar akibat keterbatasan ruang eksibisi.

Informasi dari Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Suprayitno, menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur bioskop nasional—yang terdiri dari 23 pengusaha bioskop dengan 506 gedung dan 2.403 layar—belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi lonjakan produksi dalam satu siklus edar tahunan. Keterbatasan layar ini menimbulkan antrean penayangan, memperpendek masa edar film, serta memperketat kompetisi antarsesama film nasional.

Paradoks struktural pun muncul. Peningkatan kuantitas produksi belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan kapasitas distribusi dan eksibisi. Tantangan perfilman nasional kini tidak lagi terletak pada kemampuan memproduksi karya, tetapi pada pemerataan akses layar, penguatan jaringan distribusi, serta pengelolaan siklus edar yang lebih berkeadilan. Tanpa ekspansi infrastruktur—termasuk pengembangan bioskop alternatif di berbagai daerah—lonjakan produksi berpotensi memperketat kompetisi internal dan memperpendek masa tayang film.

Dominasi klasifikasi usia 13+ dan konsentrasi pada genre tertentu juga menunjukkan kecenderungan industri mengikuti pola permintaan yang dianggap paling aman secara komersial. Dalam jangka panjang, homogenitas ini berisiko membatasi eksplorasi kreatif dan diferensiasi konten. Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain agar pertumbuhan kuantitatif produksi film dapat bertransformasi menjadi penguatan kualitas, keberagaman ekspresi, serta peningkatan daya saing perfilman nasional di tingkat regional maupun global. ❖

# Film sebagai Dokumentasi Sosial

**Lemahnya pengarsipan dan pendokumentasian film terjadi bukan karena kesadaran yang kurang. Para pembuat film masih ragu film mereka aman dari ancaman penggandaan.**



**Hairus Salim HS**
Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas

DALAM film *Bulan di Atas Kuburan*, dua sahabat Tigor dan Sahat yang baru tiba di Jakarta dari kampung nun jauh di Toba sana, terheran-heran menyaksikan seseorang yang memandu sebuah mobil yang hendak parkir. Keheranannya terutama karena kemudian si pemandu mendapatkan bayaran dari jasanya membantu mobil itu untuk parkir.

Dari peristiwa itu kemudian kedua sahabat yang sedang pusing karena tak punya pekerjaan itu memutuskan untuk melakukan hal yang sama untuk mendapatkan uang. Tapi tak mudah karena ternyata banyak orang yang juga berpikiran sama. Akibatnya terjadi persaingan dan perebutan tempat. Ujungnya Tigor tewas dalam suatu perkelahian memperebutkan sebuah lahan parkir.




FOTO: WIKIPEDIA

*Bulan di atas Kuburan* adalah film karya Asrul Sani. Judulnya diambil dari puisi terkenal Sitor Situmorang berjudul "*Malam Lebaran*" yang isinya hanya satu bait berbunyi: '*Bulan di atas kuburan*'. Film itu dibuat tahun 1973, periode di mana gelombang modal dan investasi asing mulai masuk ke Indonesia. Barang-barang mewah, tak terkecuali mobil, mulai memadati jalan. Konsumsi meningkat. Gaya hidup berubah. Setahun kemudian, 1974, pecah protes mahasiswa atas masuknya modal Jepang yang berujung pada Peristiwa Malari.

Dari satu adegan itu, saya jadi tahu dan menyadari bahwa istilah 'parkir' dan profesi 'juru parkir' merupakan hal yang baru dikenal tahun-tahun tersebut. Saya

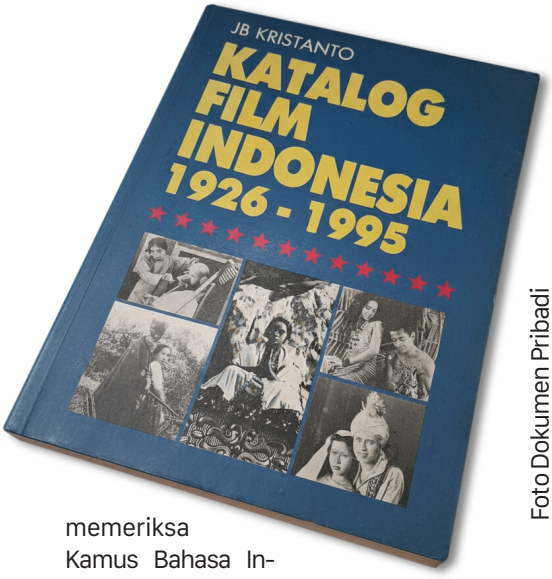



Foto Dokumen Pribadi

memeriksa Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka tahun 1952 ternyata memang belum memuat kata 'parkir'. Dengan demikian, film ini dengan baik mencatat sebuah dokumentasi yang menarik yaitu munculnya pelayanan perparkiran dan juru parkir sebagai kegiatan jasa, plus dinamika sosial dan latar belakang historisnya.

Dari ilustrasi ini maka kelihatan bahwa salah satu fungsi yang tak disadari dari film adalah sebagai dokumentasi sosial. Film adalah gambar bergerak dan digerakkan umumnya secara sistematis dan terstruktur. Ia merekam dan mencatat dengan baik bentuk sebuah benda, suara, peristiwa dan lain-lain pada suatu zaman. Dengan demikian, ia berperan seperti dokumen, meski tentu awalnya tak dimaksudkan untuk itu. Inilah alasan mengapa saya suka menonton film-film lama. Jika kita menonton lagi film-film lama maka kita seperti melihat kepingan sejarah sosial misal cara orang berpikir, berpakaian, berbicara, relasi sosial, furnitur-furnitur yang digunakan, selera seni, istilah-istilah yang dipakai, dan lain-lain.

Fungsi film sebagai dokumentasi sosial ini telah disuarakan oleh J.B. Kristanto ketika menyusun katalog film Indonesia 1926-1995. Menurutnya, sejak 1926-1995, ada 2261 film Indonesia yang telah dibuat. Namun ia mengaku hanya bisa 'mencatat' 1.000 saja dari jumlah tersebut berdasarkan sumber primer. Sumber primer yang ia maksud adalah dengan menonton filmnya secara langsung. Mengapa? Karena separuh lebih film dari jumlah itu sudah tidak ada, atau setidaknya sulit ditemukan lagi.

> Sungguh sebuah ironi, ketika tumbuh kesadaran akan fungsi film sebagai dokumentasi sosial, film itu sendiri tidak terdokumentasi dengan baik.

J.B. Kristanto sebenarnya meratapi lemahnya pendokumentasian dan pengarsipan film Indonesia. Sungguh sebuah ironi, ketika tumbuh kesadaran akan fungsi film sebagai dokumentasi sosial, film itu sendiri tidak terdokumentasi dengan baik.

Kini 30 tahun lebih telah berlalu setelah J. B. Kristanto mengeluhkan kurangnya arsip dan dokumentasi film Indonesia ini. Sejak tahun 1995 itu, ribuan film Indonesia telah dibuat. Tapi hingga saat ini ketersedian arsip dan dokumentasi film Indonesia tetap menjadi masalah. Menariknya hal ini terjadi bukan karena kesadaran akan pengarsipan dan pendokumentasian yang lemah. Saya yakin, para insan sadar akan pentingnya pengarsipan dan pendokumentasian. Atau tidak adanya lembaga –baik pemerintah maupun swasta-- yang mau melakukan pekerjaan tersebut. Saya juga pernah mendengar ada lembaga yang sudah menawarkan untuk pengarsipan film ini. Tapi ini lebih ke soal kepercayaan berkaitan dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini. Para pembuat film belum percaya atau masih ragu, film mereka akan aman dan tidak digandakan mengingat mudahnya teknologi dan proses penggandaan film sekarang ini.

Tampaknya perlu ada suatu badan atau lembaga khusus yang memikirkan dan merencanakan kerja pengarsiapan dan pendokumentasian ini. Lembaga yang profesional, otoritatif, dan terpercaya. ❖




**HADIAH.** Komisioner Lembaga Sensor Film RI Kuat Prihatin menyerahkan hadiah kepada Juara Favorit Lomba Cipta Lagu Anak

# Integrasi Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dengan Dunia Pendidikan



**Kuat Prihatin**
Ketua Komisi III Lembaga Sensor Film RI

Dengan sensor mandiri, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang kritis, berbudaya, dan mampu menjaga jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.

SALAH satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat luhur ini menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan manusia Indonesia. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu



**PEMBELAJARAN.** **Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik lomba cipta lagu anak LSF sebagai media pembelajaran sensor mandiri.**

FOTO : LSF

pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan kesadaran kritis agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks ini, integrasi program sosialisasi budaya sensor mandiri dengan dunia pendidikan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses mencerdaskan kehidupan bangsa berjalan seiring dengan pembentukan generasi yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi informasi serta hiburan.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat berdampak besar terhadap pola konsumsi informasi masyarakat, terutama generasi muda. Film, media sosial, gim daring, dan berbagai platform digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua konten layak ditonton atau dikonsumsi oleh semua kalangan. Banyak film atau tayangan yang mengandung kekerasan, pornografi, atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan usia anak. Oleh karena itu, sensor mandiri menjadi kebutuhan mendesak. Sensor mandiri bukan berarti membatasi kreativitas, melainkan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab: memilah dan memilih tontonan sesuai usia, memahami dampak psikologis dari konten, dan cerdas menggunakan sarana digital. Dengan sensor mandiri, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang kritis, berbudaya, dan mampu menjaga jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.

Integrasi program sosialisasi budaya sensor mandiri ke dalam dunia pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:

**Pendekatan kurikuler**: pesan sensor mandiri dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang relevan. Misalnya, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa belajar mengarang atau memahami tata bahasa dengan tema yang menekankan pentingnya memilih tontonan yang sesuai.

**Pendekatan kokurikuler**: kegiatan pendukung seperti diskusi kelas atau bermain peran dalam sosio drama dapat diisi dengan materi tentang sensor mandiri.

**Pendekatan ekstrakurikuler**: kegiatan kepramukaan, teater, seni musik, atau klub literasi dapat dijadikan wahana kreatif untuk menanamkan nilai sensor mandiri. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Dengan metode integrasi yang holistik, budaya sensor mandiri tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian siswa. Salah satu yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) RI adalah mengadakan lomba cipta lagu anak bertema Sensor Mandiri pada 2025 lalu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menyambut ide LSF ini sebagai sebuah media pembelajaran yang baik. Bahkan membuka peluang agar lagu-lagu yang terpilih dapat dimasukkan dalam Kicau Tiga sebagai kelanjutan Kicau Satu dan Kicau Dua, album kompilasi lagu anak sekolah produksi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Seiring hal tersebut, LSF juga tengah menyiapkan buku panduan khusus bagi para tenaga pendidik di sekolah berisi materi dan metode budaya sensor mandiri yang dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi media pengenalan dasar budaya sensor mandiri kepada anak-anak. ❖

NIKITA WILLY

# Mama Culla adalah Manifestasi Kasih Sayang

MENJADI pengisi suara karakter Mama Culla yang merupakan maskot Lembaga Sensor Film (LSF) sejak akhir 2025 bagi Nikita Willy bukan sekadar kontrak kerja. Peran yang dilakoninya tersebut diakuinya merupakan manifestasi kasih sayang sebagai ibu dalam mengawal tontonan bagi anak-anak Indonesia.

Dia meyakini bahwa suara seorang ibu memiliki kekuatan besar untuk mengalirkan rasa aman dan nilai-nilai perlindungan. Karakter Mama Culla merupakan badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) yang digambarkan sebagai sosok ibu milenial yang selalu mengingatkan pentingnya memilih tontonan sesuai usia.

Prinsip itu pula yang diakuinya diterapkan dalam mendidik kedua anaknya Issa dan Nael, dengan secara selektif membatasi waktu akses layar dan selalu mendampingi mereka saat menonton. "Apa yang mereka tonton akan membentuk cara mereka melihat dunia," ungkap Nikita.

Dalam kesehariannya pun, ibu berusia 32 tahun ini mengaku tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas tanpa kompromi. Nikita memastikan jadwal pekerjaan harus mengikuti ritme keluarga, bukan sebaliknya.

"Kita mungkin tidak bisa mengontrol segala hal di dunia ini, tapi kita bisa menjadi filter dan pelindung pertama bagi anak-anak kita. Itu sudah sangat berarti," tegasnya.

Sementara pendalaman terhadap karakter Mama Culla menuntutnya harus mempermainkan emosi, termasuk berteriak dengan nada tinggi. "Sempat beberapa kali tidak sesuai arahan *vocal director*, akhirnya harus berkali-kali *retake*. Tapi syukurlah hasilnya memuaskan," kenang Nikita. ❖ **(Refilia N Arafiana/Nuz)**





FOTO: DOK LSF



FOTO: IG/ZEEASADEL

ZEE ASADEL

# Tak Ingin Berperan di Film 21+

TAK seperti umumnya aktris yang menginginkan orang banyak menonton filmnya, Zee Asadel justru tidak ingin adik-adiknya menonton film yang diperaninya. Apa pasal?

Sebab, kebanyakan film yang dia ikut terlibat di dalamnya bergolongan usia 13 tahun ke atas (13+) dan 17 tahun ke atas (17+). Sementara kedua adiknya Rahmad Rakila dan Zia Chira Khaya masih di bawah umur.

Zee mengaku secara tegas melarang adik-adiknya menonton film yang tidak sesuai usia mereka, walaupun sedang viral. "Menurut aku *ngaruh* banget, moral nanti yang terbentuk sama adik-adik aku. Apalagi zaman sekarang sosial media luas dan cepat banget. Jadi aku *aware* banget sama adik-adikku," paparnya di kanal siniar Lembaga Sensor Film (LSF) *Classinema*.

Mantan anggota grup idola JKT48 bernama asli Azizi Shafaa Asadel ini pun mengaku tidak akan mengambil peran di film dengan klasifikasi usia 21 tahun ke atas (21+), kecuali bergenre horor atau *thriller*. Seraya mengimbau masyarakat agar membiasakan keluarganya untuk menonton sesuai usia.

"Kalian jika menonton film harus tahu dulu klasifikasi usianya, dan kesadaran diri juga perlu. Jika belum cukup umur, sebaiknya sabar dulu sampai tiba waktunya," pesannya.

❖ **(Dita Ramayani/Nuz)**

ADI BING SLAMET

# Ingin Film Anak Bangkit Kembali

SEBAGAI salah satu aktor cilik era 1970-an, Adi Bing Slamet merindukan masa ketika film anak merajai pasar tontonan di layar bioskop. Di mana setiap musim liburan sekolah, selalu ada tontonan khusus yang membuat suasana meriah.

Film anak-anak, menurutnya mengajarkan nilai tentang kasih sayang dan penghormatan terhadap orangtua. Karena itu, dia merindukan diproduksinya film anak, mengingat kesuksesan *Jumbo* pada 2025 seharusnya bisa membangkitkan kembali semangat baru merebut hati penonton.

"Sayangnya momentum itu hilang begitu saja," ungkapnya dalam perbincangan lewat saluran telepon.

Adi yang saat kecil dikenal lewat lagu *Mak Inem* menyebut, kunci keberhasilan film anak-anak ada pada skenario, karena banyak bahan cerita, tapi kreativitas menulis untuk anak masih sangat kurang. Sehingga produser ragu dengan pasar yang dianggap belum kuat dan membuat pamornya kalah dengan genre lain.

"Melemah kan banyak faktor ya. Karena sudah kelamaan tidur, bangkit lagi sudah susah. Juga kreativitas dari sutradara yang fokus membuat film-film anak enggak terlalu banyak," paparnya.



FOTO: FIMELA

❖ **(Dita Ramayani/Nuz)**

Deddy Mizwar >> Aktor Senior

# "Film Tidak Harus Ada Nilai Edukasi"

LEBIH dikenal dengan produksi sinetron bernuansa religi dengan segala kesederhanaannya, jauh sebelum itu Deddy Mizwar telah mengawali kariernya di dunia seni peran sejak 1970-an. Hingga dia berperan di *Nagabonar*, sebuah film komedi situasi tentang seorang copet di Medan yang mengangkat dirinya sebagai jenderal kemudian ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Film besutan sutradara MT Risyaf ini seolah menjadi puncak kejayaan Deddy di dunia perfilman. Karena bukan hanya membuatnya meraih penghargaan Pemeran Pria Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 1987, tapi ajang itu juga membuat film ini memenangi Skenario Asli Terbaik dan menjadi perwakilan Indonesia di Academy Awards ke-60.

Hingga pada 1997, Deddy mendirikan rumah produksi dan menggarap serial televisi *Mat Angin*, disusul serial Ramadan *Lorong Waktu, Demi Masa, Kiamat Sudah Dekat*, dan *Para Pencari Tuhan*. Selain juga film *Nagabonar Jadi 2* dan *Identitas*, di mana film yang disebut terakhir meraih Piala Citra sebagai film terbaik di Festival Film Indonesia 2009.

Sempat terjun ke dunia politik ketika memenangi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2013 mendampingi Ahmad Heryawan, yang membuat Deddy menjadi Wakil Gubernur Jabar hingga 2018. Kepada Kontributor *Sensor Film* Reinanissa S Zatihulwani beberapa waktu yang lalu, dia memaparkan sejumlah hal dan harapannya terkait dunia perfilman nasional.

**Apa tantangan terbesar yang dihadapi industri film nasional saat ini?**

Jumlah bioskop di Indonesia ini sebetulnya masih kurang dengan banyaknya film menarik yang hadir. Karena penonton film itu bukan hanya ada di satu daerah saja, tapi di semua daerah, namun, tidak semua daerah memiliki bioskop.

Kemudian, teknologi mungkin perlu di-*update*. Ada beberapa teknologi yang belum kita miliki, namun jika membicarakan keterampilan, orangnya sudah ada. Kemudian, harus ada kelembagaan yang mengatur kebijakan perfilman, karena menteri bisa diganti setiap saat. Jadi, bagaimana menteri menjadi regulator dan fasilitator saja.

**Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dari film nasional?**

Tentu saja belajar untuk memahami bagaimana membuat film yang



IG/DEDDY_MIZWAR

menarik, lalu mengikuti pelayanan pembelajaran workshop. Lalu melalui pemenuhan teknologi peralatan, mestinya pemerintahan yang memfasilitasi.

**Apa yang bisa dilakukan agar film nasional lebih dikenal dan dihargai di kancah internasional?**

Ya sudah pasti harus ada campur tangan pemerintah. Bagaimana film-film nasional disponsori dan didukung. Kan lebih bagus jika promosinya seperti itu. Seharusnya dibuat promosi internasional seperti itu. Banyak negara yang melakukan hal itu bagi film-film di negara masing-masing, contohnya, Iran, Korea, Jepang dan lainnya.

Nah, Indonesia belum ada peran pemerintahan yang ikut berpartisipasi. Jadi, harus dirancang juga film mana yang bisa dijadikan sebagai sarana diplomasi kebudayaan. Karena sampai saat ini Indonesia belum ada film sebagai sarana diplomasi kebudayaan. Padahal, secara *culture*, secara keberagaman budaya tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia. China sudah sangat lama melakukan, apalagi Amerika, bahkan India.

**Bagaimana agar film tidak hanya menghibur, tapi juga memiliki nilai edukasi dan inspirasi?**

Ya, jangan terlalu dibebankan jika ada yang ingin membuat film. Film tidak harus ada nilai edukasi. Jika si pembuat film ingin membuat film yang menghibur seperti film komedi namun tetap dimasukkan sedikit nilai edukasi, ya sah saja. Ingin memasukan nilai kultural, ya silakan saja.

**Saran bagi pemula yang ingin berkarier di industri film?**

Selalu membuat film, selalu berkarya, agar film Indonesia berkembang lebih baik. Kalau bikin film bagus, pasti bikin film terus.

**Apakah LSF masih dianggap sesuatu yang menakutkan bagi kreativitas para sineas?**

Tidak. Kalau saya pribadi tidak ada suatu hal yang menakutkan. Karena pembuat film juga sudah pasti paham, kecuali jika ada yang ingin membuat kontroversi. ❖ **(Nuz)**



SUMBER: IST

**ADEGAN DI FILM *NAGABONAR*. Perwakilan Indonesia di Academy Awards ke-60.**

**BIODATA**

Nama: Deddy Mizwar
Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 5 Maret 1955

**PENDIDIKAN**

- Pogram Studi Teater, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Kesenian Jakarta (S1)
- Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran(S2)
- Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran (S3)

**FILMOGRAFI**

- Gaun Pengantin (1974)
- Sunan Kalijaga (1983)
- Opera Jakarta (1985)
- Kejarlah Daku...Kau Kutangkap (1986)
- Arie Hanggara (1986)
- Nagabonar (1987)
- 2 dari 3 Laki-laki (1990)
- Nagabonar Jadi 2 (2007)

**SERIAL TV**

| | |
|---|---|
| 1997—1998 | Mat Angin |
| 1999—2025 | Lorong Waktu Musim 1—7 |
| 2005 | Demi Masa |
| 2005—2007 | Kiamat Sudah Dekat |
| 2007—2025 | Para Pencari Tuhan |
| 2015 | Preman Pensiun |

**PENGHARGAAN**

- Pemeran Utama Pria Terbaik untuk Bukan Impian Semusim di Festival Film Indonesia (1982)
- Pemeran Utama Pria Terbaik untuk Sunan Kalijaga di Festival Film Indonesia (1984)
- Pemeran Utama Pria Terbaik untuk Nagabonar di Festival Film Indonesia (1987)
- Pemeran Utama Pria Terbaik untuk 2 dari 3 Laki-Laki di Festival Film Indonesia (1990)
- Lifetime Achievement Award di MTV Indonesia Movie Awards (2007)
- Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung (2011)
- Lifetime Achievement Award di Festival Film Wartawan Indonesia (2022)



FOTO : LSF

**PENGHARGAAN.** Sekretaris LSF, Titik Umi Kurniawati menerima penghargaan ZI WBK dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat.

### JAWAB TANTANGAN DENGAN PRESTASI

# LSF Raih Penghargaan ZI WBK dan PPID

Kebijakan efisiensi anggaran, bukanlah hambatan bagi Lembaga Sensor Film (LSF) RI untuk bekerja keras dan meraih prestasi dalam meningkatkan performa kinerja. Bagi sebuah Lembaga negara, anggaran sangatlah dibutuhkan untuk menopang program kerja yang sudah ditetapkan. Namun komitmen yang kuat dari seluruh komponen, jauh lebih penting dalam meningkatkan kinerja organisasi.

**Widayat S. Noeswa**

DALAM kondisi anggaran yang terbatas, sejak satu tahun terakhir, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) terbukti bukan hanya mampu menyelesaikan berbagai tugas yang sifatnya mandatori, namun juga tetap inovatif dan progresif. Di sela-sela menjalankan tugas utama melakukan sensor terhadap puluhan ribu judul film dan iklan film, LSF mampu menorehkan sejumlah capaian penting. Hal ini juga menunjukkan LSF terus berbenah diri dalam menata aspek *good governance*, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Karena masyarakat dan seluruh *stakeholder* menuntut LSF bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel dalam melayani publik. Apalagi LSF juga berupaya ikut berperan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, di bidang manusia unggul dan kebudayaan, yaitu dengan menciptakan generasi cerdas dan berkarakter, penguatan identitas dan budaya nasional serta mendorong industri kreatif nasional.

Salah satu capaian penting LSF pada tahun 2025, adalah mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen dan kinerja LSF dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta berkinerja tinggi. ZI WBK merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang sudah didengungkan oleh pemerintahan pascareformasi, dengan tujuan untuk pencegahan korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk terus mengikis praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terutama di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan. Korupsi adalah salah satu aspek yang menciptakan iklim birokrasi yang rumit, lambat dan tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat.

> "Website PPID LSF dibenahi agar informasi publik lebih terbuka transparan"
>
> **Dewi Rahmarini**
> **Anggota Dewan Pengarah**
> **PPID Lembaga Sensor Film**

Keberhasilan memperoleh penghargaan ZI WBK pada 2025 bukanlah usaha yang mudah. Karena penilaiannya sangat komprehensif dan ketat. Di antaranya dilihat dari dua aspek utama, yaitu pengungkit dan hasil. Aspek pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara dari aspek hasil, penilaiannya mencakup terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. "Saya sangat optimis setelah melihat kinerja seluruh jajaran, ke depan LSF akan mampu meraih prestasi yang lebih tinggi," ucap Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Luciana saat syukuran perolehan penghargaan ZI WBK di Jakarta, pertengahan Januari 2026 lalu.

Penilaian ZI WBK dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dari seleksi di tingkat kementerian, dimana Inspektorat Jenderal melakukan penilaian terhadap 20 satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Pada seleksi ini, tiga satker dinyatakan lolos dan berhak maju pada proses penilaian ZI WBK selanjutnya, yaitu Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah




**INFORMATIF.** **Ketua LSF DR Naswardi menerima penghargaan PPID dari Komisi Informasi Publik (KIP) RI atas prestasinya mendapat predikat INFORMATIF, dalam keterbukaan informasi publik.**

FOTO : LSF

XI Jawa Timur, BPK Wilayah XX Maluku dan Sekretariat LSF. Dalam proses penilaian lembar kerja evaluasi tingkat kementerian, LSF memperolah nilai 86,28 dan berhasil maju ke tingkat penilaian Kementerian PANRB. Penyerahan penghargaan ZI WBK dilakukan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini pada 9 Desember 2025 di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Sementara di lingkungan Kementerian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris LSF, Titik Umi Kurniawati pada 10 Februari 2026.

Capaian kedua adalah penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Komisi Informasi Publik (KIP) RI. LSF mendapatkan predikat INFORMATIF dari KIP karena dianggap mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik dari berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara transparan dan mudah, terutama terkait proses penyensoran film dan iklan film. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap kementerian dan lembaga yang menggunakan anggaran negara, wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan publik sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Anggota Dewan Pengarah PPID LSF Dewi Rahmarini menyatakan, proses penilaian PPID dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama adalah *assessment* terhadap penyediaan data dan informasi melalui website PPID. Tahap kedua adalah Uji Publik, dimana penilaian didasarkan pada presentasi oleh Ketua LSF. Penilaian yang dilakukan oleh KIP mencakup berbagai aspek terkait keterbukaan informasi. Karena itu LSF berusaha keras menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama terkait dengan proses penyensoran. "Kita membenahi saluran informasi melalui website PPID LSF, dengan menyediakan berbagai informasi dan data secara transparan sehingga memudahkan masyarakat ketika berhubungan dengan LSF," tambah Dewi. Penghargaan ini menjadi pemicu seluruh jajaran di LSF untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam keterbukaan informasi publik ke depan. Ini juga merupakan capaian yang membanggakan karena pada 2024 lalu LSF, hanya mendapatkan predikat TIDAK INFORMATIF. ❖ **Dita**

# GALERI FOTO




**VISITASI :** LSF menyerahkan piagam penghargaan kepada PT Khasrisma Starvision Plus, sebagai salah satu rumah produksi dengan jumlah film terbanyak yang disensor LSF sepanjang tahun 2025.

FOTO : LSF




**LOMBA CIPTA LAGU.** Ketua LSF DR Naswardi menyerahkan hadiah secara simbolik kepada salah satu pemenang Lomba Cipta Lagu Anak 2025 yang diselenggarakan LSF.

FOTO : LSF




**ANUGERAH LSF 2025.** Sutradara senior Garin Nugroho menerima Lifetime Achievement pada Malam Anugerah LSF yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Indosiar pada awal November 2025.

FOTO : LSF




**LSF CORNER.** Usai peresmian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. DR Abdul Mu'ti meninjau LSF Corner, yang berada di lantai dasar Gedung F kompleks Kementerian, Senayan Jakarta, pertengahan Desember 2025.

FOTO : LSF

## MENUJU KONGRES BPI IV 2026:

# Merajut Kedaulatan Sinema di Persimpangan Zaman

Kekosongan Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN) selama 15 tahun terakhir mengakibatkan hilangnya target strategis, membuat pertumbuhan industri berjalan sporadis tanpa navigasi jangka panjang yang jelas.




**DISKUSI.** Steering Committee Kongres BPI IV memimpin diskusi pada Pra-Kongres.

FOTO : BPI

BADAN Perfilman Indonesia (BPI) resmi memulai rangkaian *Road to Kongres IV BPI 2026* melalui Pra-Kongres I pada 15–16 Februari 2026 dan Pra-Kongres II pada 28 Februari–1 Maret 2026 yang diselenggarakan di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta. Forum ini menjadi wadah konsolidasi strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui evaluasi AD/ART dan penyiapan mekanisme pemilihan pengurus periode 2026–2029. Selain penguatan internal, agenda utama lainnya adalah perumusan Rencana Induk Perfilman (RIP) BPI 2025–2045 yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Perfilman Indonesia saat ini tidak sekadar sedang tumbuh; ia sedang bertransformasi di tengah arus disrupsi yang tak terelakkan.



**Erlan Basri**
Ketua Subkomisi Pemantauan LSF




**PENGANTAR.** Plt. Ketua Umum BPI, Celerina Judisari memberi pengantar pada Pra-Kongres.



**PRA-KONGRES.** Direktur Film, Musik, dan Seni Kemenbud Syaifullah Agam membuka Pra-Kongres BPI.

FOTO : BPI

SEJAK disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, industri sinema nasional ibarat kapal megah yang melaju kencang tanpa kompas presisi. Kekosongan Rencana Induk Perfilman Nasional selama lebih dari satu dekade membuat pertumbuhan industri berjalan tanpa navigasi jangka panjang yang jelas. Melalui momentum Kongres IV, BPI berupaya melakukan kalibrasi ulang dengan merumuskan Rencana Induk Perfilman (RIP) 2025–2045 yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Syaifullah Agam, Direktur Film, Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan, menegaskan bahwa Rencana Induk Perfilman harus menjadi peta jalan bersama yang mengintegrasikan berbagai aspek penting, mulai dari produksi, distribusi, ekshibisi, pengarsipan, hingga pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Tanpa visi jangka panjang yang disepakati bersama, pertumbuhan industri akan berjalan tanpa arah. Penguatan simpul Komisi Film Daerah dan penataan ulang kerangka apresiasi bagi insan film diharapkan mampu mentransformasi perfilman Indonesia menjadi ekosistem yang inklusif, berdaulat secara budaya, dan menjadi pilar ekonomi kreatif kelas dunia pada 2045.

Pada hari pertama Pra-Kongres I, diskusi yang berlangsung cukup intens menyentuh esensi keberadaan BPI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perfilman, yakni sebagai lembaga swasta yang bersifat mandiri. Dalam forum tersebut muncul aspirasi agar BPI bertransformasi menjadi lembaga independen dengan dukungan anggaran negara yang lebih jelas. Kemandirian lembaga tidak cukup hanya menjadi konsep normatif, melainkan harus ditopang oleh sistem pendanaan yang stabil agar BPI dapat menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga pemikir kebijakan di bidang perfilman.

Keberhasilan Kongres BPI IV pada akhirnya tidak akan diukur dari siapa yang memenangkan kursi kepemimpinan, melainkan dari sejauh mana resolusi yang dihasilkan mampu mendorong lahirnya kebijakan perfilman yang lebih adaptif. Kongres ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan film untuk meninjau kembali agenda yang belum terselesaikan, sekaligus merumuskan langkah bersama menuju masa depan di mana film Indonesia tidak hanya unggul secara artistik, tetapi juga berdaulat secara sistemik di tingkat global. ❖



DOKUMEN PRIBADI

# Joko Anwar
# Ksatria Sinema dari Indonesia

Joko Anwar mencatat pencapaian penting bagi dunia seni dan budaya Tanah Air, dengan menerima gelar kehormatan *Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres* (Ksatria Ordo Seni dan Sastra) dari Kementerian Kebudayaan Prancis.

**Erlan Basri**
Ketua Subkomisi Pemantauan LSF

JOKO Anwar terus memperluas batas eksplorasi perfilman Indonesia. Karya-karyanya yang sering kali mengangkat tema gelap namun sarat kritik sosial tidak hanya berhasil di tangga *box office* lokal, tetapi juga mendapat pengakuan yang konsisten di panggung global. Dedikasi pada visi penyutradaraan inilah yang pada penghujung tahun 2025 lalu diapresiasi dengan sebuah penghormatan kultural dari Pemerintah Republik Prancis.

Pada 11 Desember 2025, Joko Anwar mencatat pencapaian penting bagi dunia seni dan budaya Tanah Air. Di Kementerian Kebudayaan Prancis, Paris, ia secara resmi menerima gelar kehormatan *Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres* (Ksatria Ordo Seni dan Sastra). Momentum ini menjadi penanda objektif bahwa sinema Indonesia semakin diakui di kancah pergaulan seni internasional.

*Ordre des Arts et des Lettres* adalah bentuk pengakuan budaya dari Pemerintah Prancis, yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap seni dan sastra di tingkat dunia.

Dalam seremoni tersebut, medali disematkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati. Penerima gelar tingkat *Chevalier* (Ksatria) mendapatkan atribut berupa medali berbentuk bintang

bersudut delapan berlapis emas, dengan pita hijau di dada sebelah kiri. Secara filosofis, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi seniman yang karya-karyanya dinilai berhasil memperkaya dialog kebudayaan global.

**Mengapa Joko Anwar?**

Dalam pidato penganugerahannya, Menteri Rachida Dati secara khusus menyoroti pendekatan penyutradaraan Joko Anwar yang khas. Lewat balutan genre yang populer di masyarakat seperti horor, *thriller* psikologis, hingga komedi gelap Joko Anwar tidak sekadar menyajikan tontonan hiburan. Ia menggunakan genre tersebut sebagai medium untuk membicarakan realitas sosial yang sering kali sulit diungkapkan secara langsung. Melalui narasi ketegangan, film-filmnya membedah isu ketidakadilan struktural, dinamika kekuasaan, hingga menyentuh sisi rentan dari sifat dasar manusia. Karya-karyanya merekam dinamika masyarakat modern dan disajikan melalui eksekusi teknis penyutradaraan yang rapi dan terukur. Dengan penganugerahan ini, Joko Anwar bergabung ke dalam daftar seniman dunia yang karya-karyanya memengaruhi budaya populer. Ia kini berdiri sejajar dengan nama-nama besar yang juga pernah menerima penghargaan dari Ordo ini.

Di jajaran sutradara, ada nama-nama seperti Martin Scorsese, Tim Burton, David Lynch, Pedro Almodóvar, Denis Villeneuve, hingga maestro animasi Hayao Miyazaki. Di ranah seni peran, ordo ini diisi oleh figur seperti Meryl Streep, Cate Blanchett, Tilda Swinton, dan Isabelle Huppert. Dari ranah musik, nama seperti David Bowie turut menghiasinya. Fakta bahwa sineas Indonesia masuk dalam daftar tersebut merupakan langkah maju yang konkret bagi diplomasi budaya kita.

**Kebanggaan Nasional**

Bagi Joko Anwar, penghargaan ini dimaknai lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa kualitas dan kedewasaan karya sineas Indonesia kini



DOKUMEN PRIBADI

semakin diperhitungkan oleh dunia. Gelar Ksatria ini menjadi pengingat bahwa bahasa sinema pada hakikatnya bersifat universal.

Kisah-kisah yang berakar kuat dari lokalitas dan dinamika masyarakat kita apabila dieksekusi dengan standar penyutradaraan dan penceritaan yang matang memiliki daya tarik yang mampu menembus batas-batas negara.

Joko Anwar sejatinya tengah meneruskan estafet pengakuan yang telah dirintis lebih dahulu oleh sineas senior, Garin Nugroho. Jauh sebelumnya, Garin telah menerima gelar *Chevalier* pada 2016. Menariknya, nyaris bersamaan dengan momentum Joko Anwar di Paris, Pemerintah Prancis juga baru saja menaikkan tingkat penghargaan Garin menjadi *Officier* (Perwira), satu level di atas tingkatan Ksatria. Penganugerahan kenaikan tingkat ini disematkan langsung oleh Duta Besar Prancis di Yogyakarta pada awal Desember 2025 lalu. Fakta bahwa dua generasi sineas Indonesia kini mendapatkan pengakuan berjenjang dari institusi kebudayaan tertinggi Prancis membuktikan bahwa ekosistem perfilman kita memiliki fondasi regenerasi estetika yang terus berkembang dan dihormati secara konsisten di tingkat global.

Selamat untuk Joko Anwar, sang Ksatria Seni dan Sastra. Kita menantikan karya-karya selanjutnya yang akan kembali meramaikan layar global dan menjaga eksistensi sinema Indonesia di tingkat internasional. ❖

# Setengah Abad Penjaga Ingatan: Sinematek Indonesia

Lebih dari lima dekade sejak didirikan pada tahun 1975, institusi ini telah menjadi jantung pertahanan bagi ingatan audiovisual bangsa.




SINEMATEK INDONESIA

**ARTEFAK.** **Sinematek Indonesia menjadikan poster-poster film tempo dulu sebagai salah satu artefak budaya yang berharga dan tak ternilai.**

**Erlan Basri**
Ketua Subkomisi Pemantauan LSF

MENILIK perjalanan ekosistem sinema Indonesia tidak akan pernah utuh tanpa menempatkan Sinematek Indonesia (SI) di pusat narasinya. Lebih dari lima dekade sejak didirikan pada tahun 1975, institusi ini telah menjadi jantung pertahanan bagi ingatan audiovisual bangsa. Di usianya yang kini melampaui setengah abad, apresiasi tertinggi sudah sepantasnya diberikan kepada lembaga arsip film pertama di Asia Tenggara ini. SI bukan sekadar gudang penyimpanan benda mati, melainkan infrastruktur memori kolektif yang memastikan bahwa jejak langkah kebudayaan, dinamika sosial, dan capaian estetika masyarakat Indonesia yang terekam dalam seluloid tidak menguap begitu saja ditelan laju zaman.

Apresiasi pertama harus disematkan pada fondasi visioner yang diletakkan oleh pendirinya, mendiang Misbach Yusa Biran. Ia memiliki kesadaran historis yang melampaui zamannya. Inisiatif untuk meminta para produser film menyerahkan salinan karyanya ke SI merupakan langkah taktis yang menyelamatkan mahakarya film-film Indonesia. Visi ini mendudukkan film pada posisi aslinya: sebagai artefak budaya yang berharga. Di dalam kaleng-kaleng film yang diselamatkan, tersimpan dialek bahasa yang mungkin tak lagi dituturkan, lanskap kota yang telah berubah bentuk, serta gagasan-gagasan kritis dari para sineas yang merekam denyut nadi masyarakat di eranya.

Rasa hormat yang mendalam wajib ditujukan pada kerja-kerja senyap yang terus berlangsung di Sinematek Indonesia. Publik mungkin hanya menikmati hasil akhir berupa restorasi cemerlang atau pemutaran retrospektif film klasik, namun di balik itu, terdapat dedikasi operasional yang sering kali luput dari pandangan. Selama lebih dari 50 tahun, para staf dan arsiparis SI mendedikasikan waktu mereka untuk membersihkan pita-pita seluloid yang sangat





SINEMATEK INDONESIA

**KUNJUNGAN CNC.** Farry menerima kunjungan tim Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) Prancis didampingi Sutradara Riri Riza.

rentan terhadap jamur, penyusutan, dan kerusakan fisik. Tidak berhenti di situ, mereka juga merawat dan mengkatalogkan ribuan materi pendukung, mulai dari skenario yang mulai menguning, foto-foto adegan, poster, hingga catatan *behind the scene*. Ini adalah pekerjaan yang menuntut ketelitian analitis tingkat tinggi dan kesabaran, terutama ketika dikerjakan di tengah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.

Hal lain yang paling patut diapresiasi dari Sinematek Indonesia saat ini adalah resiliensi kelembagaan mereka dalam menghadapi disrupsi teknologi dan krisis struktural. Di bawah estafet kepemimpinan Farry Hanief Yusa Biran, SI menunjukkan daya tahan yang mengagumkan, tetap beroperasi meskipun tanpa jaminan pendanaan yang pasti secara bertahun-tahun. Langkah strategis untuk berjejaring dengan komunitas seperti Indonesian Film Archivist Society (IFAS) dan merangkul konten kreator sebagai perpanjangan tangan komunikasi publik adalah bukti bahwa lembaga ini terus berupaya merelevankan diri. Mereka proaktif merancang proposal ke pihak internasional, menjangkau audiens muda, dan melakukan inventarisasi ulang untuk memetakan tantangan pengarsipan modern.

Dedikasi selama lebih dari lima dekade ini membuktikan satu hal: merawat arsip bagi SI adalah sebuah tanggung jawab moral yang melampaui urusan teknis belaka. Selama setengah abad, Sinematek Indonesia telah berjalan hampir sendirian demi memikul beban pelestarian sejarah yang sejatinya adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Apresiasi terhadap institusi ini tidak lagi cukup hanya melalui glorifikasi atau ucapan simbolis semata, harus bertransformasi menjadi dukungan struktural dan kebijakan riil. Menjelang berbagai perumusan kebijakan dan agenda besar oleh para pemangku kepentingan perfilman nasional, sudah saatnya kerja keras Sinematek diakui dan diintegrasikan sebagai prioritas utama. Menyelamatkan Sinematek bukan hanya tentang menyelamatkan kepingan masa lalu, tetapi merupakan investasi mutlak untuk memastikan masa depan industri sinema Indonesia tetap memiliki pijakan sejarah yang berdaulat dan bermartabat. ❖




SINEMATEK INDONESIA

**KOLEKSI.** Sinematek Indonesia merawat dengan baik berbagai koleksi produk sinema dan ribuan materi pendukungnya.



CINEMAPOETICA.COM

**KESEPIAN. Film *Postcards From The Zoo* (2012), mencerminkan kesepian dan pencarian identitas melalui bahasa visual yang sederhana tetapi kuat.**

# Edwin dan Keberanian Menjaga Bahasa Sinema

Perkembangan perfilman tidak hanya ditentukan oleh angka penonton atau kesuksesan komersial. Tapi didukung juga oleh para pembuat film yang dengan tekun merawat bahasa sinema itu sendiri.

**M. Aditya Pratama**
Staf Pengajar FFTV IKJ

SETIAP generasi perfilman biasanya memiliki beberapa nama yang tidak hanya membuat film, tetapi juga membentuk cara kita memandang sinema. Di Indonesia, Edwin adalah salah satu sosok yang sering muncul dalam percakapan tersebut. Ia bukan tipe pembuat film yang mencari keramaian. Justru ia dikenal melalui karya-karya yang tenang, personal, dan memiliki bahasa visual yang khas.

Sejak film panjang pertamanya, *Babi Buta yang Ingin Terbang* (2008), Edwin menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam bercerita. Film itu hadir dengan gaya kontemplatif. Ceritanya tidak selalu linier, dan atmosfernya memberi ruang bagi penonton untuk memahami makna di balik gambar. Bagi sebagian penonton, pengalaman menonton film Edwin mungkin terasa tidak biasa. Namun, di situlah daya tariknya: ia mengajak penonton melihat film bukan sekadar hiburan, tetapi sebagai pengalaman sinematik yang lebih reflektif.

Pendekatan ini terus terlihat dalam karya-karya berikutnya. *Postcards From The Zoo* (2012), misalnya, mencerminkan kesepian dan pencarian identitas melalui bahasa visual yang sederhana tetapi kuat. Film ini menarik perhatian di berbagai festival internasional. Ia menunjukkan bahwa sinema Indonesia bisa berbicara dalam bahasa universal tanpa




**KONTEMPLATIF.** Sutradara Edwin hadir dengan gaya kontemplatif pada besutan perdananya *Babi Buta yang Ingin Terbang* (2008)

KINEFORUM.ORG

kehilangan konteks lokalnya.

Puncak pengakuan internasional datang melalui *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* (2021), adaptasi dari novel Eka Kurniawan yang memenangkan *Golden Leopard di Festival Film Locarno*. Film ini menunjukkan sisi lain dari Edwin: lebih berani dalam genre, lebih dinamis, tetapi tetap mempertahankan kepekaan artistiknya yang sudah menjadi ciri khasnya.

Namun, kontribusi Edwin bagi perfilman Indonesia tidak hanya terletak pada penghargaan yang ia raih. Yang lebih penting adalah bagaimana ia membuka kemungkinan baru dalam cara bercerita. Film-filmnya menunjukkan bahwa sinema Indonesia tidak harus selalu bergerak dalam satu pola yang sama. Ada ruang bagi film yang lebih personal, puitis, dan eksperimental.

Bagi banyak sineas muda, kehadiran figur seperti Edwin menjadi inspirasi penting. Ia membuktikan bahwa konsistensi dalam visi artistik dapat membawa film Indonesia melampaui batas geografis dan menjangkau penonton di berbagai belahan dunia.

Di tengah perkembangan industri film yang pesat, keberagaman pendekatan justru menjadi kekuatan utama. Film populer yang menjangkau jutaan penonton bisa berdampingan dengan film yang lebih reflektif dan eksploratif. Keduanya sama-sama penting dalam membangun ekosistem sinema yang sehat.

Dalam konteks ini, karya Edwin layak mendapatkan apresiasi. Ia tidak hanya menghadirkan film-film yang kuat secara artistik, tetapi juga menjaga ruang bagi sinema yang berani bereksperimen. Sinema yang memberi kesempatan bagi penonton untuk merenung, merasakan, dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda.

Hari Film Nasional menjadi pengingat bahwa perkembangan perfilman tidak hanya ditentukan oleh angka penonton atau kesuksesan komersial. Ia juga didukung oleh para pembuat film yang dengan tekun merawat bahasa sinema itu sendiri.

Melalui karya-karyanya, Edwin menunjukkan bahwa film Indonesia dapat tumbuh tidak hanya sebagai industri, tetapi juga sebagai ruang ekspresi artistik yang kaya. Selama masih ada sineas yang berani mengeksplorasi kemungkinan baru seperti ini, masa depan sinema Indonesia akan selalu memiliki arah menarik untuk diikuti.❖




**BERANI.** Karya Edwin pada Seperti *Dendam*, *Rindu Harus Dibayar Tuntas* (2021) lebih berani dalam genre meski tetap pertahankan kepekaan artistik.

WHITEBOARDJOURNAL.COM



# SUZZANNA SANTET DOSA DI ATAS DOSA

SUZZANNA (Luna Maya) dicintai oleh Bisman (Clift Sangra), penguasa desa yang kejam dan haus kekuasaan. Keserakahan Bisman akan kekuasaan itu menyebabkannya menyantet ayah Suzzanna hingga tewas. Kematian sang ayah yang tidak wajar dan tiba-tiba, itu membuat Suzzanna nekat mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam. Di tengah usahanya, Suzzanna bertemu dan jatuh cinta pada pemuda alim bernama Pramuja (Reza Rahadian). Suzzanna mengalami dilema antara melanjutkan balas dendam atau memilih cinta dan mempertaruhkan segalanya.

Mengingat film Suzzanna sebelumnya, *Suzzanna: Bernapas dalam Kubur* (Rocky Soraya dan Anggi Umbara, 2018) dan *Suzzanna: Malam Jumat Kliwon* (Guntur Soeharjanto, 2023), maka *Suzzana Santet Dosa di atas Dosa*, ini merupakan film ketiga dari *universe* Suzzanna. Menampilkan kolaborasi aktor-aktris papan atas lintas generasi, film yang mengandung unsur klenik/mistis, kekejaman, dan kengerian yang intens ini, oleh LSF diklasifikasikan untuk penonton usia usia 17 tahun ke atas. Bijaklah memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usia. ❖ **(mil)**

**JUDUL :** SUZZANNA SANTET DOSA DI ATAS DOSA
**TANGGAL TERBIT STLS :** 19 Februari 2026
**TEMA :** Balas dendam dengan ilmu hitam santet
**GENRE :** Horor
**PENGGOLONGAN USIA :** 17+
**KANDUNGAN :** Kekerasan
**PRODUKSI :** Soraya Intercine Films
**DURASI :** 135 menit
**TAHUN :** 2026
**NEGARA :** Indonesia
**BAHASA :** Bahasa Indonesia
**TAYANG :** 18 Maret 2026
**PRODUSER :** Sunil Soraya, Ram Soraya
**SUTRADARA :** Azhar Kinoi Lubis
**PENULIS SKENARIO :** Jujur Prananto, Ferry Lesmana, Sunil Soraya
**PENATA KAMERA :** Muhammad Firdaus
**PENYUNTING GAMBAR:** Sastha Sunu
**PENATA ARTISTIK :** Alfi Syahri
**PENATA SUARA :** Sergei Groshev
**PENATA MUSIK :** Tony Dwi Setiaji
**PEMERAN :** Luna Maya, Reza Rahadian, Clift Sangra, Djenar Maesa Ayu, Andy /rif, Iwa K, Adi Bing Slamet, Nunung, Azis Gagap, El Manik

17+

# Na Willa




**Judul :** NA WILLA
**Tanggal Terbit STLS :** 26 Februari 2026
**Tema :** Nostalgia dan keindahan masa kecil
**Genre :** Drama
**Penggolongan usia :** SU
**Kandungan :** Hiburan
**Produksi :** Visinema
**Durasi :** 118 Menit
**Tahun :** 2025
**Negara :** Indonesia
**Bahasa :** Indonesia
**Tayang :** 20 Maret 2026
**Produser :** Anggia Kharisma, Novia Puspa Sari
**Sutradara :** Ryan Adriandhy
**Penulis Skenario :** Reda Gaudiamo, Ryan Adriandhy
**Penata Kamera :** Yadi Sugandi
**Penyunting Gambar :** Teguh Raharjo
**Penata Artistik :** Daniel Galang
**Penata Suara :** Satrio Budiono
**Penata Musik :** Gloria Maria, Ofel Obaja
**Pemeran :** Luisa Adreena, Irma Rihi, Junior Liem, Freya Mikhayla, Mbok Tun

Di sebuah gang kecil di Surabaya pada era 1960-an, dunia terbentang seperti langit yang belum selesai digambar. Di sanalah Na Willa (Luisa Adreena) hidup di antara suara radio tua yang tampak ajaib di matanya. Langit yang terlalu biru untuk dipercaya, debu yang menari di sela cahaya, dan tawa teman-teman yang mengambang seperti doa-doa kecil yang belum sempat dipanjatkan. Di rumah, ada Mak (Irma Rihi) perempuan yang wajahnya lembut namun matanya menyimpan kekuatan. Mak bukan hanya penjaga rumah, melainkan penenun ketenangan. Dari tangannya yang hangat, Willa belajar tentang sabar, tentang merapikan luka kecil tanpa banyak kata, dan tentang mencintai hidup meski dunia kadang tak sepenuhnya jujur. Dalam pelukan Mak, Willa menemukan tempat pulang yang tak pernah berubah.

*Na Willa* adalah kisah tentang masa kecil yang pelan namun penuh arti. Tentang keberanian memandang hidup dengan jujur, tentang imajinasi yang menjadi pelindung, dan tentang kenangan yang kelak akan tumbuh menjadi rindu. Sebuah perjalanan sunyi namun hangat, yang mengajak kita kembali menjadi anak-anak, walau hanya sejenak. Lembaga Sensor Film mengklasifikasikan film ini untuk penonton semua umur (SU). ❖ **(fas)**

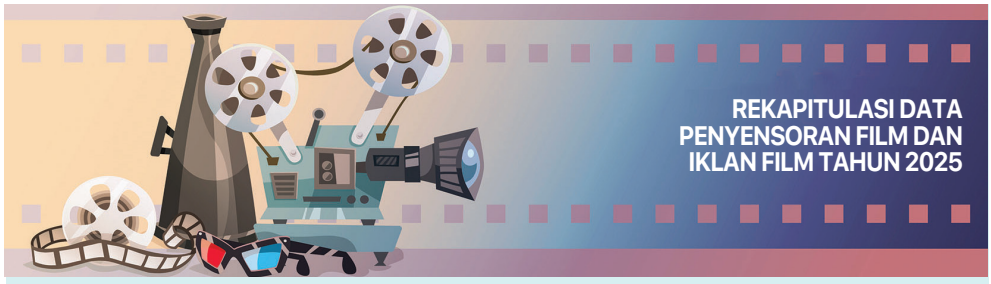
BUMI tahun 2090 dilanda krisis air bersih, dan sumber daya vital dikuasai korporasi Nerotek. Untuk mencari solusi, Pratiwi (Lutesha) dikirim ke Mars mencari Zeolit Omega, mineral yang diyakini dapat memurnikan air. Selama misi, Pratiwi diketahui hamil dan melahirkan Pelangi (Messi Gusti), manusia pertama di Mars. Setelah ditinggalkan manusia, Pelangi tumbuh sendirian di Mars ditemani robot rusak yang dianggapnya keluarga. Ia pun memulai pencarian berbahaya Zeolit Omega, sekaligus menemukan makna persahabatan, keberanian, dan harapan untuk menyelamatkan Bumi, serta bertemu Banyu, ayahnya (Rio Dewanto).

Upie Guava, sutradara, penulis skenario dan penata kamera, ini dikenal karena karya dokumenter dan video musik, khususnya dokudrama *Kemarin* (2020). Film *Pelangi di Mars* adalah debutnya sebagai sutradara film panjang. Mengeksplorasi tema antariksa, genre yang belum digarap industri perfilman Indonesia, LSF mengklasifikasikan film ini untuk penonton usia Semua Umur (SU).

❖ **(poc)**

**Judul** : *PELANGI DI MARS*
**STLS** : 2 Maret 2026
**Tema** : Petualangan anak dan robot menyelamatkan Bumi
**Genre** : Drama, Fantasi
**Penggolongan Usia** : SU
**Kandungan** : Hiburan
**Produksi** : Mahakarya Pictures, MBK Productions
**Durasi** : 112 menit
**Tahun** : 2026
**Negara** : Indonesia
**Bahasa** : Bahasa Indonesia
**Tayang** : 18 Maret 2026
**Produser** : Dendi Reynando
**Sutradara** : Upie Guava
**Penulis Skenario** : Alim Sudio, Upie Guava
**Penata Kamera** : Upie Guava
**Penyunting Gambar** : Upie Guava, Ara Abukasim
**Penata Artistik** : Yudhi Komo
**Penata Suara** : Satrio Budiono
**Penata Musik** : Eunike Tanzil
**Pemeran** : Messi Gusti, Lutesha, Myesha Lin, Rio Dewanto, Livy Renata.
**Pengisi Suara** : Dimitri Arditya (Sulil), Gilang Dirga (Petya), Kristo Immanuel (Yoman), Vanya Rivani (Kimichi), Bimo Kusumo Yudo (Batik).





# REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM TAHUN 2025

e-SiAS
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

## FILM DAN IKLAN FILM LULUS SENSOR BERDASARKAN PERUNTUKAN




## REKAPITULASI DATA PENYENSORAN BERDASAR PENGGOLONGAN USIA

| | |
|---|---|
| SU | : 11.930 (29,03%) |
| 13+ | : 19.859 (48,33%) |
| 17+ | : 8.982 (21,86%) |
| 21+ | : 321 (0,78%) |
| **TOTAL:** | **41.092** |

e-SiAS
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik

## FILM LAYAR LEBAR
## 545

IMPOR 275

NASIONAL 270

## KLASIFIKASI USIA



SU

13+

17+

21+

| | |
|---|---|
| SU | : 69 (12,66%) |
| 13+ | : 242(44,40%) |
| 17+ | : 216(39,64%) |
| 21+ | : 18(3,30%) |

## ASAL NEGARA



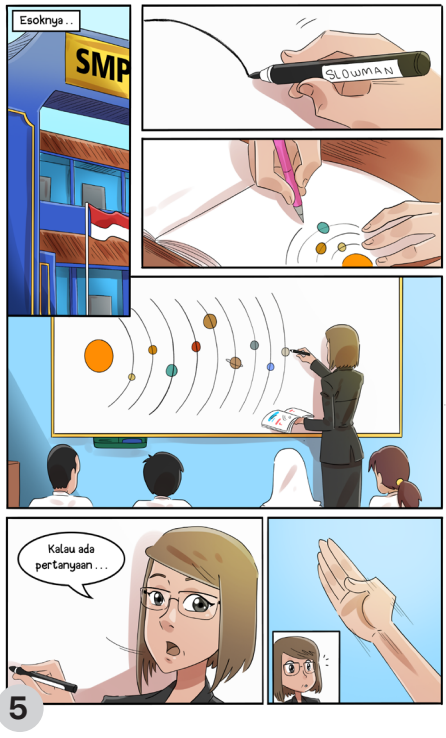
- INDONESIA 270
- AMERIKA SERIKAT 122
- KOREA SELATAN 54
- JEPANG 30
- INDIA 26
- TIONGKOK 12
- THAILAND 9
- PRANCIS 4
- HONGKONG 3
- MALAYSIA 3
- INGGRIS 2
- NORWEGIA 2
- TUNISIA 1
- IRAN 1
- TAIWAN 1
- BRASIL 1
- MESIR 1
- DENMARK 1
- TURKI 1
- PALESTINA 1

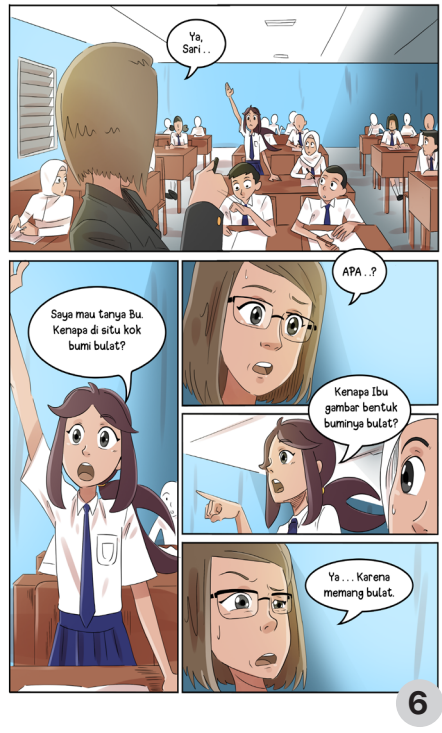
## GENRE

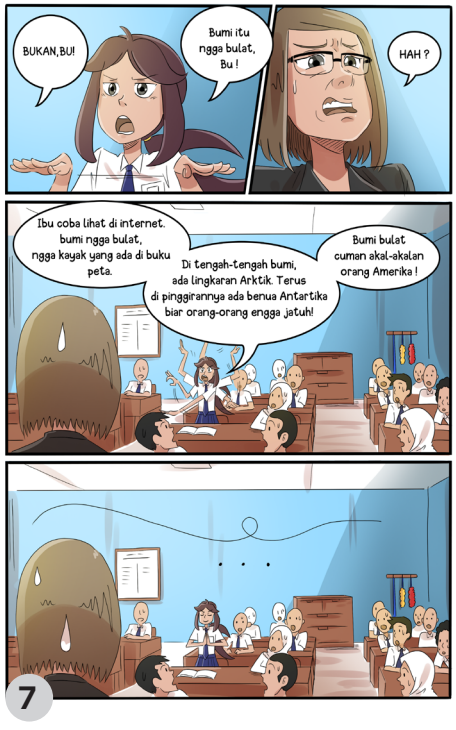


- DRAMA 209
- ACTION 76
- HOROR 75
- THRILLER/MISTERI 71
- ANIMASI 36
- MUSIKAL 21
- FANTASI 17
- DOKUMENTER 16
- PERANG 7
- KOMEDI 7
- CRIME 6
- PETUALANGAN 2
- SCIENCE FICTION 1
- SILAT 1


LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
BELUM WAKTUNYA
Hari minggu siang
Sari menikmati acara musik di TV
1
Tiba - tiba ...
KOK DIGANTI SIH ?!
GANTIAN!
KAN ACARA-KU BELUM SELESAI!
DIEM ! !
Yang muda tuh nurut sama yang tua!
2
Kan di HP - ku tontonannya dikit banget. yutub - nya dilimit.
3
Nih. Pake punyaku. pake akunku juga.
Makasih, kak!
WOOOOOWW ! mantaaapp bangett ! !
4


Esoknya..
SMP
SLOWMAN
Kalau ada pertanyaan...
5


Ya, Sari..
Saya mau tanya Bu. Kenapa di situ kok bumi bulat?
APA..?
Kenapa Ibu gambar bentuk buminya bulat?
Ya... Karena memang bulat.
6


BUKAN,BU!
Bumi itu ngga bulat, Bu!
HAH?
Ibu coba lihat di internet. bumi ngga bulat, ngga kayak yang ada di buku peta.
Di tengah-tengah bumi, ada lingkaran Arktik. Terus di pinggirannya ada benua Antartika biar orang-orang engga jatuh!
Bumi bulat cuman akal-akalan orang Amerika!
7


Bumi itu... ... Kamu dapat info itu darimana toh, Sari?
Dari HP, Bu. Nonton di YUTUB!
Trus... Selain itu kamu tahu apa lagi?
Manusia ke bulan juga HOAX, Bu! Itu juga akal-akalan Amerika.
Umm... Boleh Ibu bicara?
Sari, kalau nonton harusnya didampingi orang tua.
Agar kamu dapat tontonan yang sesuai dengan usiamu dan gak salah informasi.
Ingat MMT Memilah, Memilih, Tontonan Sensor Mandiri.
LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
SENSOR MANDIRI
SU 13+ 17+ 21+


LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
menyatakan bahwa film ini telah lulus sensor
TELOP BARU
LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUK 2026
D21
UNTUK 21 TAHUN KE ATAS
Ketua,
Dr. Naswardi, M.M., M.E.


LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
menyatakan bahwa film ini telah lulus sensor
TELOP BARU
LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUN 2026
UNTUK SEMUA UMUR
SU
Ketua,
Dr. Naswardi, M.M., M.E.
Tontonan seru un